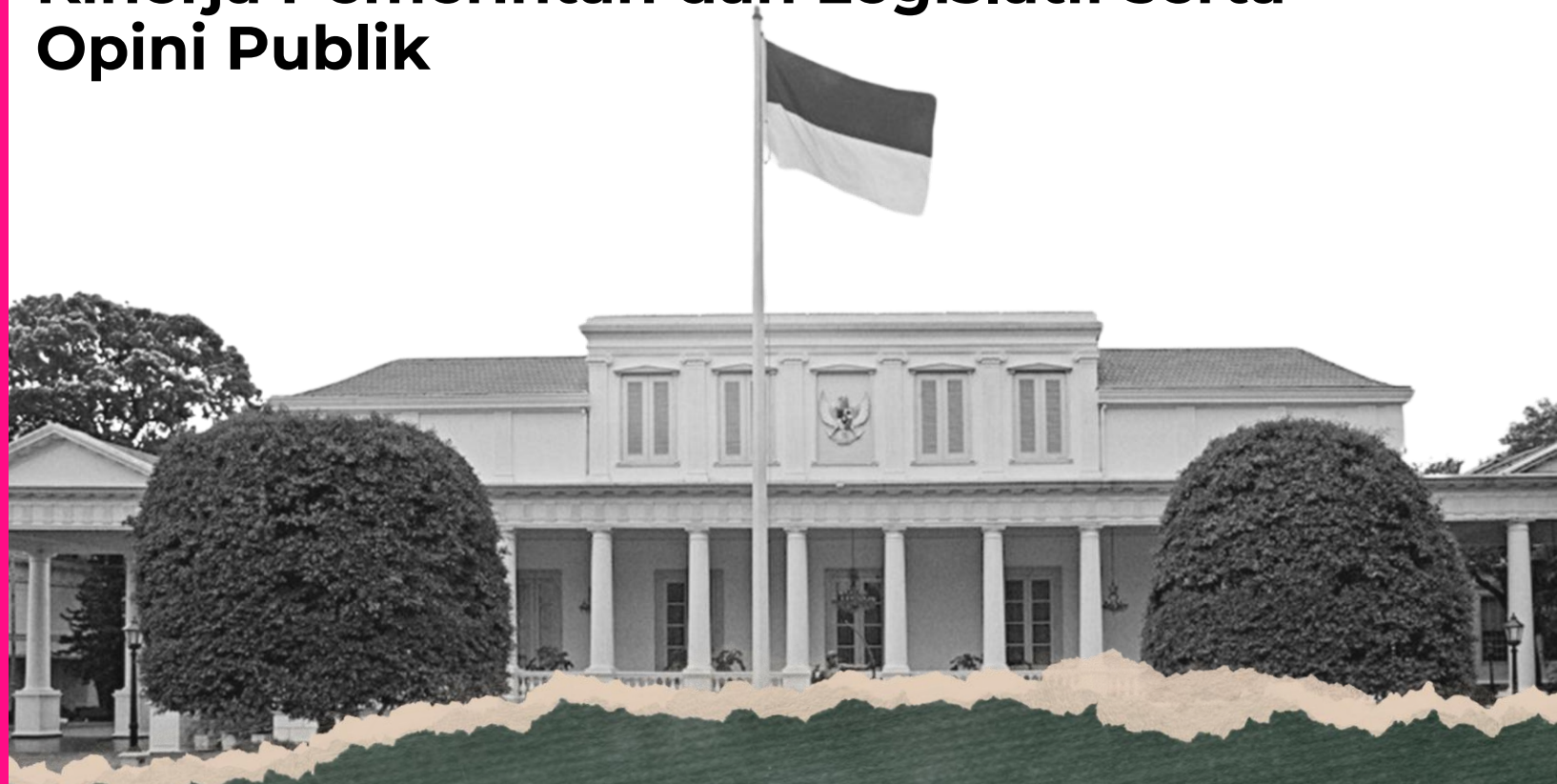


Laporan National Kawula17 Survey Q3 2025

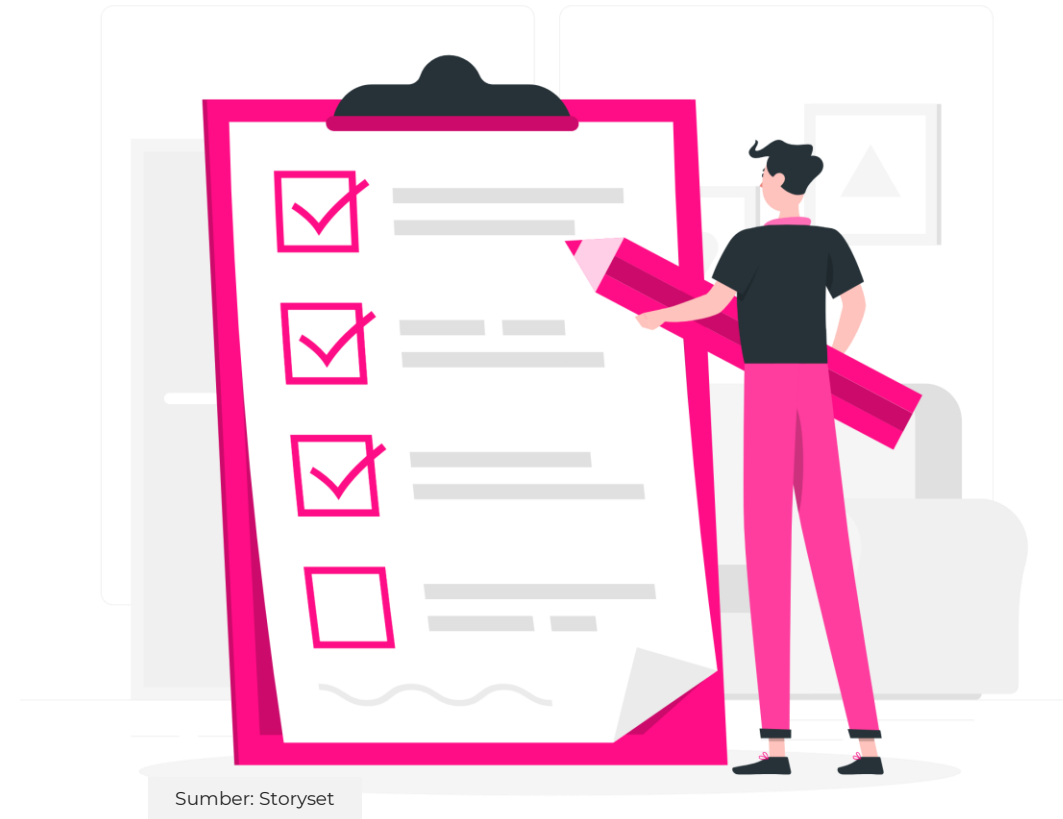


**Kinerja Pemerintah dan Legislatif serta
Opini Publik**



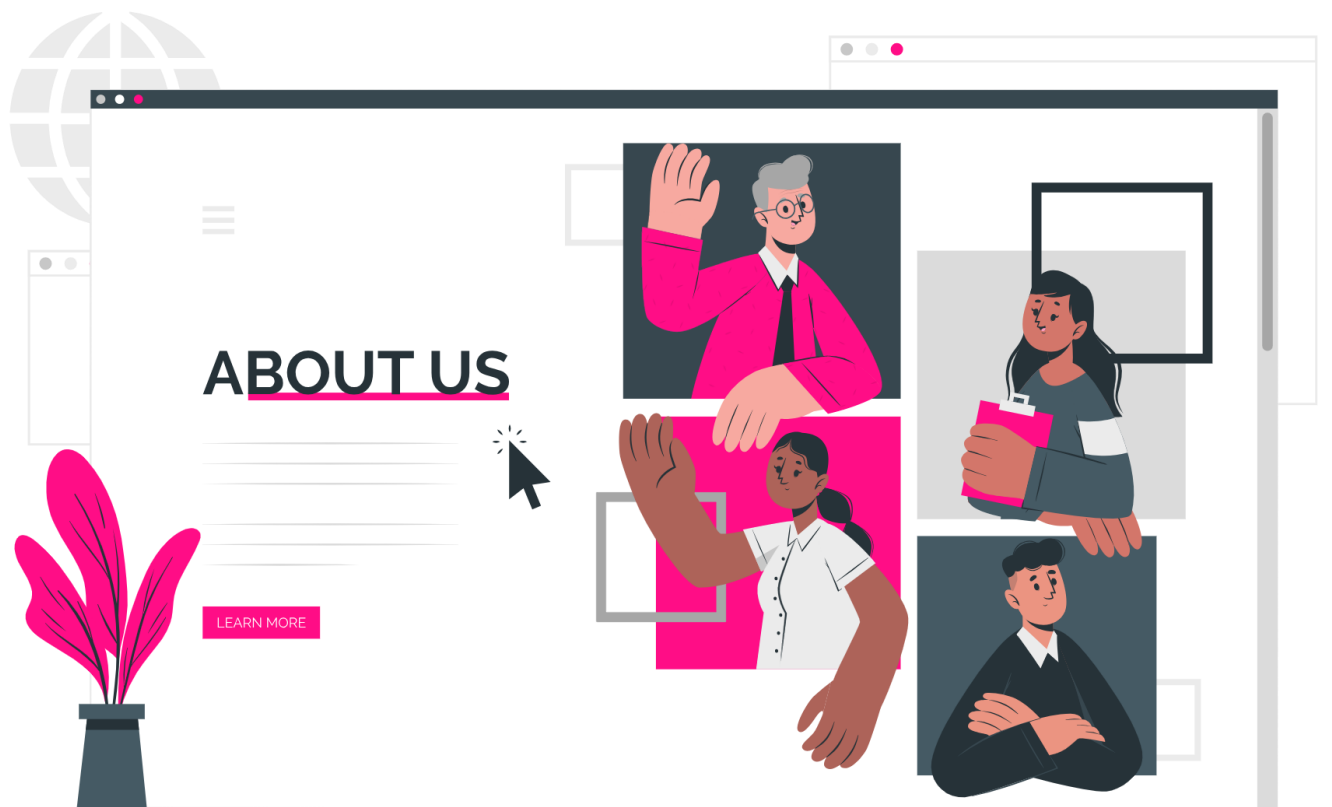
Daftar Isi

<u>Perkenalan.....</u>	3
<u>Metodologi.....</u>	6
<u>Temuan.....</u>	9
<u>Isu Prioritas.....</u>	12
<u>Penilaian Kinerja Pemerintah.....</u>	21
<u>Ekspektasi terhadap Pemerintahan.....</u>	28
<u>Pantauan Partai Politik.....</u>	39
<u>Opini Publik terhadap RUU Berjalan.....</u>	45
<u>Lampiran.....</u>	54





Perkenalan



Sumber: Storyset

Sekilas tentang Yayasan PP17

Apa itu Yayasan PP17?

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program, di antaranya adalah **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan per kuartal untuk memantau partai politik dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkini. Pemantauan regular ini dilakukan untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif terhadap posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa melihat pilihan partai berdasarkan isu yang mereka usung. Isu-isu yang diangkat harus relevan terhadap kebutuhan pemilih dan dinamis.

Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Secara sederhana, VAA dapat diibaratkan seperti kuis yang terdiri dari beberapa set pertanyaan yang disediakan bagi para *users*. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan di masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung dengan perwakilan partai**.

Posisi-posisi partai teridentifikasi menjadi dasar pembuatan VAA. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba untuk **memetakan pilihan** publik dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap *up to date*.



Tentang Survei Nasional Kawula17

National Kawula17 Survey (NKS) atau Survei Nasional Kawula17 bertujuan untuk mendorong diskusi, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi terkini. NKS dilakukan empat kali dalam setahun atau per kuartal untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat. Publikasi setiap laporan NKS dapat diakses melalui website **Kawula17.id**.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Kawula17 mempublikasikan laporan NKS yang berisi tentang:

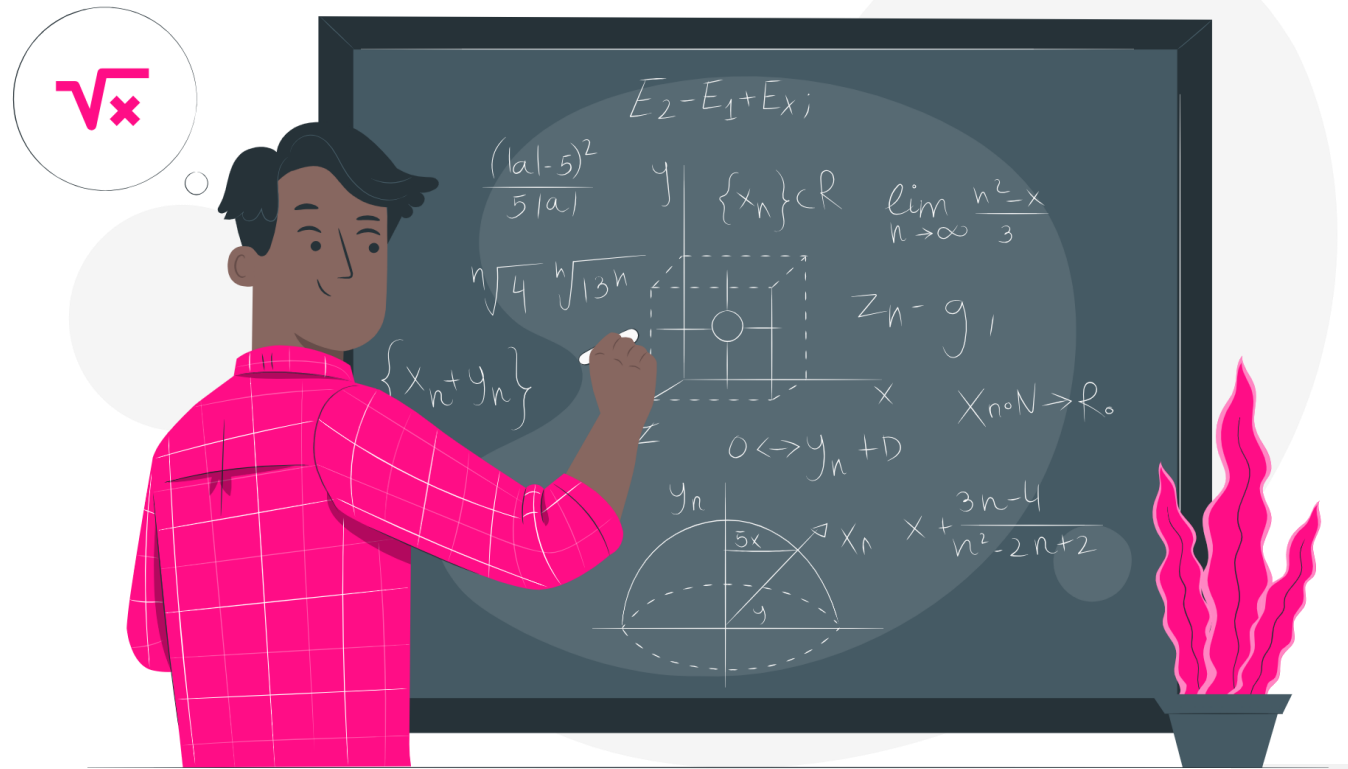
1. Isu prioritas masyarakat.
2. Penilaian kinerja pemerintah.
3. Ekspektasi terhadap pemerintahan.
4. Pantauan partai politik.
5. Opini publik terkait beberapa RUU prolegnas.
6. Persepsi publik pasca demonstrasi, peran koalisi, dan peran oposisi



Sumber: Canva



Metodologi



Desain Penelitian

Tujuan



- Memahami sikap masyarakat terhadap:
- ✓ Isu terkini yang sedang berkembang.
 - ✓ Program dan kinerja pemerintah.
 - ✓ Prioritas isu untuk segera diselesaikan.
 - ✓ Beberapa RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional.
 - ✓ Koalisi Indonesia Maju dan peran oposisi.
 - ✓ Aksi demonstrasi akhir Agustus.

Periode



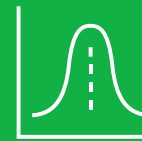
26-29 September 2025

Metode



Computer-Assisted Self Interviewing (CASI)
atau survei daring

Sampling



n = 404 responden*

Umur: 17 – 44 tahun

Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden

base: all, n = 404*

Jenis kelamin

Laki-laki	51%
Perempuan	49%

Umur

17-24 tahun	30%
25-34 tahun	36%
35-44 tahun	34%

Pendidikan

SMP & SMA sederajat	85%
Perguruan Tinggi	15%

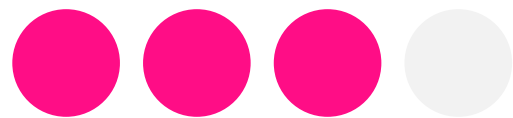
Wilayah

Sumatera	19%
Jawa	54%
Lainnya	27%

Area

Perkotaan	82%
Pedesaan	18%

**Untuk memastikan hasil yang representatif bagi Indonesia, data telah diberi bobot berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah. Agar "effective base" optimal, faktor bobot dibuat di bawah 2.*



Temuan



Temuan ⁽¹⁾



Pantauan Partai Politik

Hasil survei Q3 2025 menunjukkan bahwa **Partai Gerindra** masih mempertahankan posisinya sebagai **pilihan teratas** masyarakat. **Perindo dan PSI** merupakan dua partai non-parlemen yang saat ini memperoleh suara lebih dari $\geq 4\%$, sehingga memungkinkan kedua partai ini untuk **masuk ke parlemen**.



Penilaian Kinerja Pemerintah

Pada kuartal ketiga 2025, skor kepuasan masyarakat terhadap **kinerja pemerintah berada pada angka 5,1**. Penurunan paling tajam terjadi pada penilaian terhadap isu **HAM (-10%)**. Di sisi lain, persepsi terhadap penanganan korupsi menunjukkan sedikit perbaikan (+7%), meskipun sentimennya masih negatif. Kinerja pemerintah dalam isu kemiskinan dianggap (sangat) buruk dengan NET score -57%.

Ketidakpuasan ini juga mencuat dalam reaksi terhadap kenaikan gaji ASN di Q3 yang meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Program-program *quick win* yang diandalkan pemerintah juga **tampak kehilangan kepuasan publik**: kepuasan terhadap program **Makan Bergizi Gratis (MBG) turun signifikan** (-9% dari Q1), sementara program **food estate mengalami penurunan konsisten sepanjang 2025**, mencapai -21%.



Isu Prioritas Masyarakat

Isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kemiskinan (61%), ekonomi (57%), antikorupsi (53%) dianggap sangat penting oleh masyarakat saat ini. **Isu kemiskinan (34%)** mengalami kenaikan sangat signifikan dari Q3 2024 (+33%).

Secara spesifik, isu-isu yang dianggap sangat mendesak untuk segera diselesaikan saat ini masih **berkaitan dengan ekonomi**, misalkan **pengangguran (49%) dan korupsi (47%)**. Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak transparan disertai maraknya kasus keracunan (45%) menjadi isu non-ekonomi yang paling disorot masyarakat saat ini. Dibandingkan dengan Q2, terdapat perubahan fokus yang signifikan terkait isu MBG, dengan kenaikan prioritas sebesar +30%.

Dalam konteks lingkungan, dua isu teratas yang dianggap prioritas adalah **pengelolaan sampah tidak efisien (33%) dan proyek pertambangan yang merusak lingkungan (32%)**. Selain kedua isu ini, perampasan hutan adat (26%) mendapatkan kenaikan fokus (+8%) dibandingkan Q2. Meningkatnya perhatian publik terhadap proyek pertambangan dan perampasan hutan adat kemungkinan dipicu oleh maraknya kasus di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk sorotan publik terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah.

Temuan (2)



Ekspektasi terhadap Pemerintah

Secara umum, masyarakat Indonesia masih menunjukkan keyakinan bahwa pemerintah akan mampu memenuhi program-programnya. Setidaknya **2 dari 5 orang merasa (sangat) yakin** dengan upaya pemerintah untuk memenuhi janji dan programnya.

Alasan utama keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam pemenuhan program-program adalah **karakter Prabowo yang tegas (27%), dukungan kuat masyarakat (52%), dan pemberantasan korupsi (49%)**. Menariknya, isu pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan keyakinan sekaligus ketidakpercayaan masyarakat. Faktor ketidakpercayaan tersebut diikuti oleh **maraknya korupsi (55%), ekonomi yang melemah (37%), dan pejabat yang kurang kompeten (35%)**.



Opini Publik terhadap RUU Berjalan

Opini publik terhadap RUU yang sedang berjalan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berada di sisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan publik. Dari beberapa RUU Prolegnas yang ditanyakan pada kuartal ini, masyarakat paling mendukung **revisi atas UU Kehutanan yang melindungi hutan dari kerusakan dengan melibatkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal (70%)**.



Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik pada Q3 2025 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap RKUHAP, RUU Kehutanan, RUU BUMN, RUU Polri, RUU Pangan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Penyiaran. Indeks partai berada dalam skala 0-100, dimana 100 menunjukkan keselarasan sikap dengan aspirasi masyarakat. Pada Q3, masih terdapat jarak antara posisi partai dengan partai politik terhadap berbagai RUU dalam Prolegnas. **Partai NasDem mendapatkan skor terendah dengan 28.6, sementara skor PDIP menjadi yang tertinggi (51.2)**.

Partai Politik	Indeks Q3	Indeks Q2	Indeks Q1
Partai Demokrat	42,0	37,8	35,5
Partai NasDem	28,6	37,8	61,0
PKB	39,1	37,6	61,0
PDIP	51,2	36,5	28,9
Partai Golkar	31,2	36,5	31,1
PKS	47,6	35,5	61,1
Partai Gerindra	47,6	31,7	46,2
PAN	41,9	27,9	35,6



Persepsi Masyarakat terhadap Oposisi dan Aksi Demonstrasi

Hasil NKS Q3 2025 menunjukkan bahwa **semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap peran oposisi dan dukungan terhadap aksi demonstrasi, semakin kuat pula kecenderungan mereka pada nilai-nilai demokrasi.** Sebaliknya, semakin otoriter spektrum politik mereka, semakin tinggi pula dukungan terhadap kontrol negara atas ranah privat masyarakat.

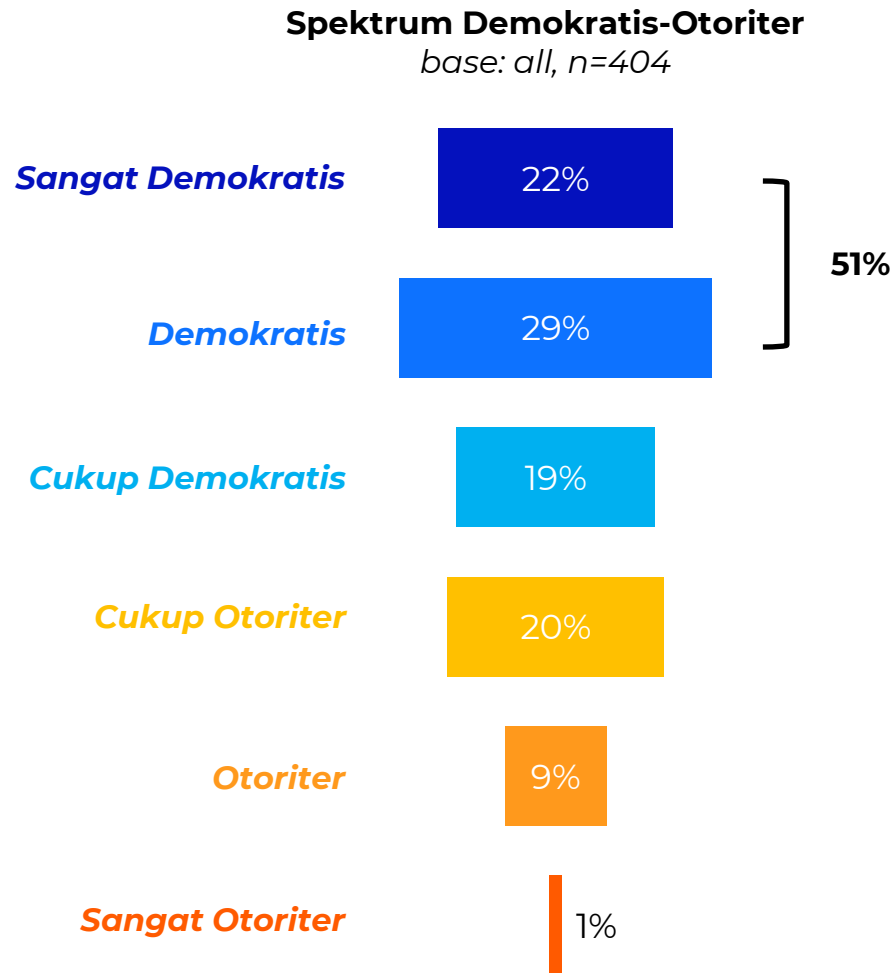
Beralih ke aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, setidaknya 4 dari 5 orang mengetahui gelombang demonstrasi tersebut. Sebagian besar dari mereka yang mengetahui juga menunjukan dukungannya.

Selanjutnya, mayoritas masyarakat mengetahui dan pentingnya peran oposisi dalam pemerintahan. Mayoritas responden yang memahami peran oposisi **menilai oposisi harus berperan aktif dalam pemerintahan (70%).** Dalam aspek akuntabilitas dan pengawasan, 72% masyarakat menilai oposisi perlu berperan aktif. Sementara itu, keterlibatan oposisi dalam kebijakan dipahami oleh 76% masyarakat yang sangat menyadari peran oposisi.



Segmentasi Demokratis- Otoritarian

Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong (sangat) demokratis



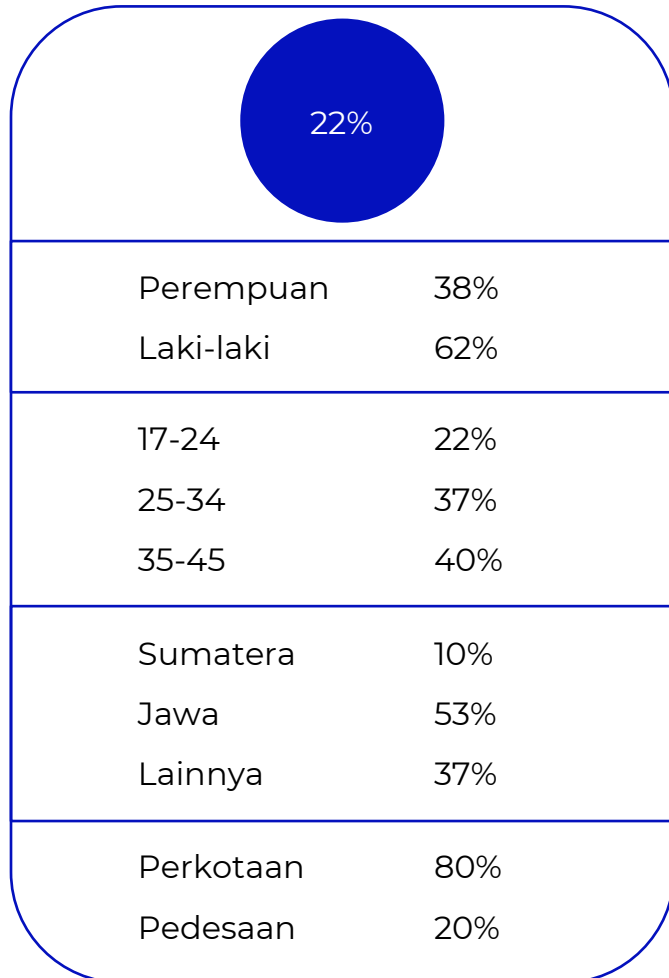
Pengujian skala demokratis-otoriter mengidentifikasi enam kelompok utama, yaitu: (1) sangat demokratis, (2) demokratis, (3) cukup demokratis, (4) cukup otoriter, (5) otoriter, dan (6) sangat otoriter. **Skala ini dibuat berdasarkan dukungan masyarakat terhadap aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, pemahaman masyarakat atas peran-peran oposisi dalam pemerintahan, serta posisi mereka terhadap tujuh RUU Prolegnas**, mencakup: (1) RKUHAP, (2) RUU Kehutanan, (3) RUU BUMN, (4) RUU Polri, (5) RUU Pangan, (6) RUU Perampasan Aset, dan (7) RUU Penyiaran.

Peran-peran oposisi yang menjadi dasar dari pengujian skala demokratis-otoriter adalah pemahaman salah tiga peran oposisi, yaitu: (1) kewenangan kekuasaan, (2) akuntabilitas dan pengawasan, dan (3) keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Semakin paham masyarakat terhadap peran oposisi dalam pemerintahan, semakin demokratis juga sikap masyarakat.

Semakin demokratis mereka, semakin tinggi pula dukungan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Temuan ini mencerminkan kesadaran mereka terhadap proses demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, semakin otoriter spektrum politik mereka, semakin tinggi pula dukungan terhadap kontrol negara atas ranah privat masyarakat.

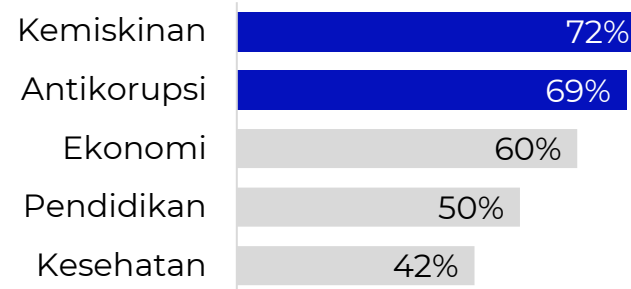
Sangat Demokratis

Demografi & profil sangat demokratis



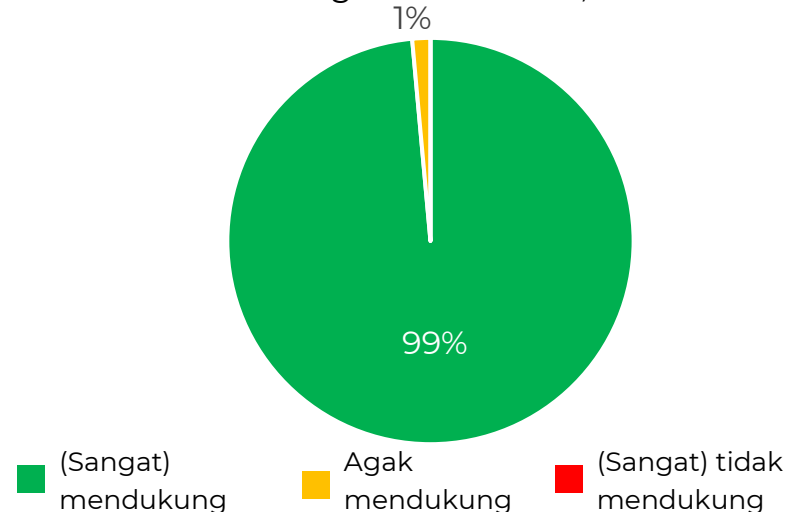
Topik prioritas

base: sangat demokratis, n=88



Mendukung aksi demonstrasi

base: sangat demokratis, n=84



Isu prioritas

base: sangat demokratis, n=88

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Maraknya korupsi anggaran	68%
Pengangguran tinggi	66%
MBG tidak transparan	61%
Tunjangan pejabat terlalu tinggi	59%
Harga bahan pokok mahal	44%

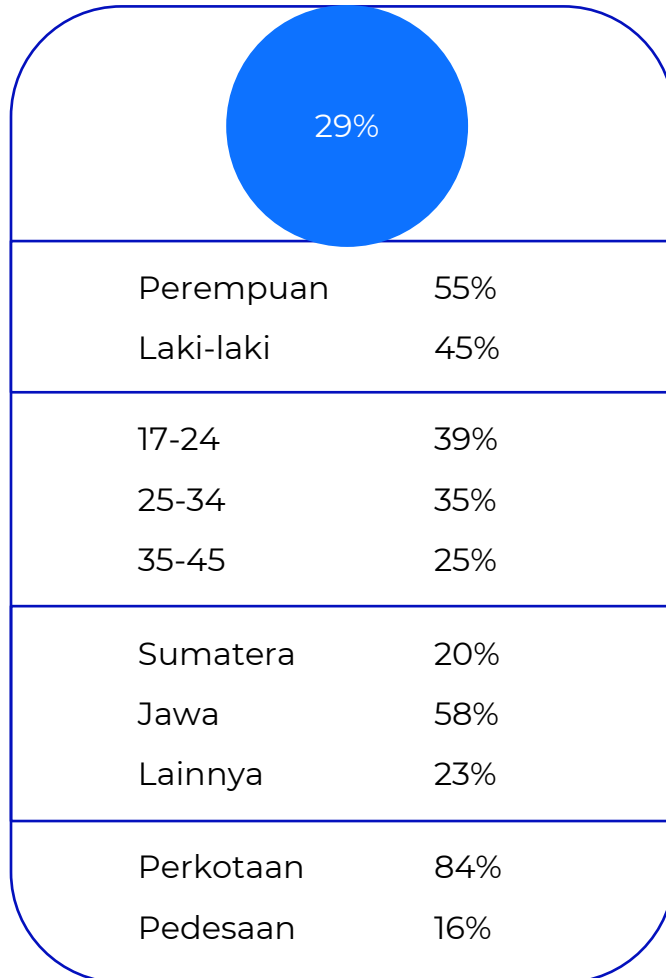
Isu lingkungan prioritas

base: sangat demokratis, n=88

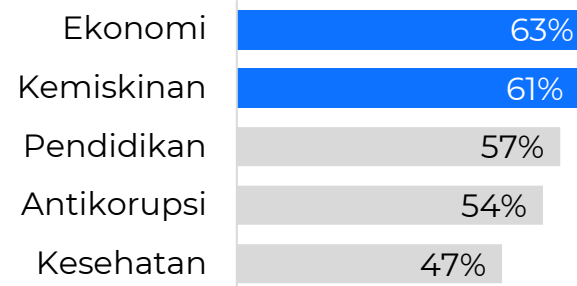
Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pengelolaan sampah kurang baik	51%
Proyek tambang yang merusak	50%
Pencemaran air dan udara	33%
Perampasan hutan adat	26%
Pencemaran mikroplastik	26%

Demokratis

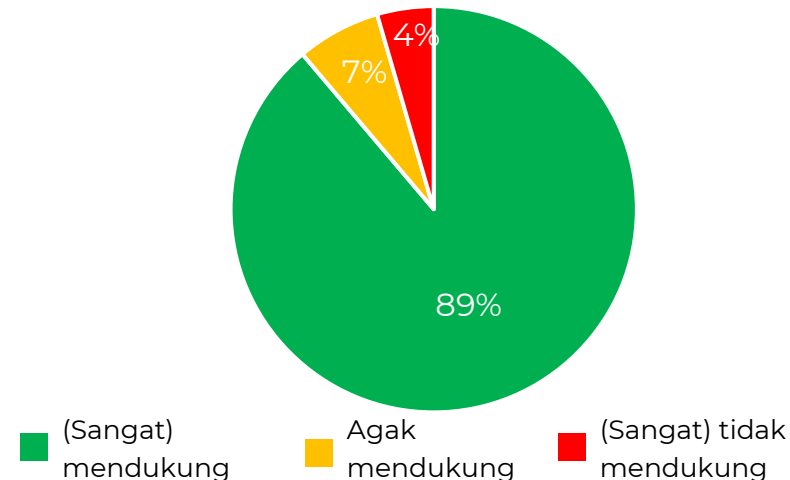
Demografi & profil demokratis



Topik prioritas base: demokratis, n=117



Mendukung aksi demonstrasi base: demokratis, n=117



Isu prioritas base: demokratis, n=117

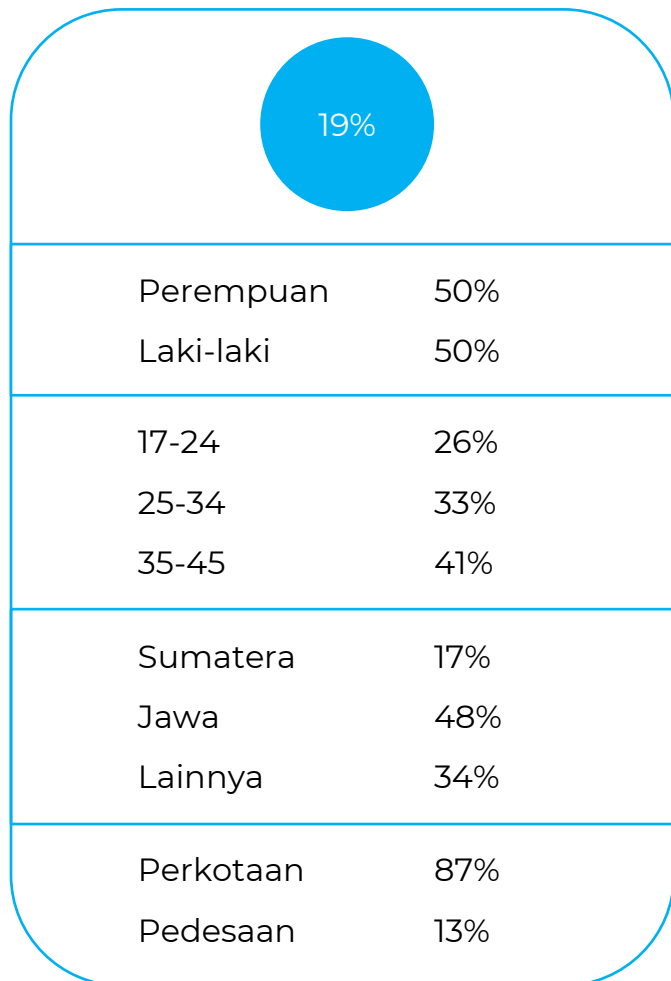
Isu yang perlu segera diselesaikan	
Pengangguran tinggi	54%
MBG tidak transparan	49%
Maraknya korupsi anggaran	49%
Harga bahan pokok mahal	45%
Upah pekerja tidak layak	39%

Isu lingkungan prioritas base: demokratis, n=117

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pengelolaan sampah kurang baik	31%
Proyek tambang yang merusak	29%
Pencemaran air dan udara	28%
Kepemilikan SDA pribadi	25%
Banjir dan air rob	23%

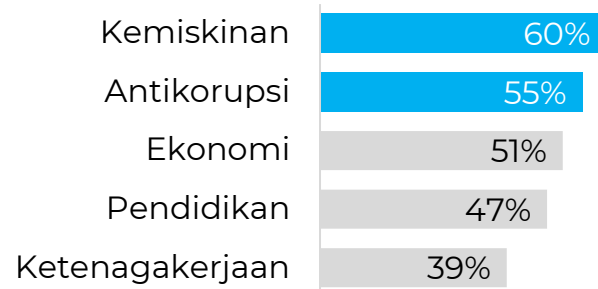
Cukup Demokratis

Demografi & profil cukup demokratis



Topik prioritas

base: cukup demokratis, n=75



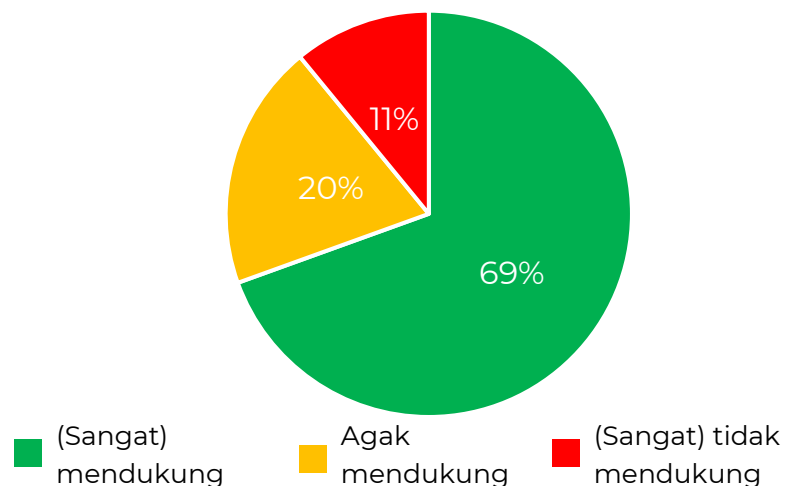
Isu prioritas

base: cukup demokratis, n=75

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Tunjangan pejabat terlalu tinggi	39%
Pengangguran tinggi	38%
Maraknya korupsi anggaran	36%
Biaya pendidikan mahal	36%
Harga bahan pokok mahal	36%

Mendukung aksi demonstrasi

base: cukup demokratis, n=67



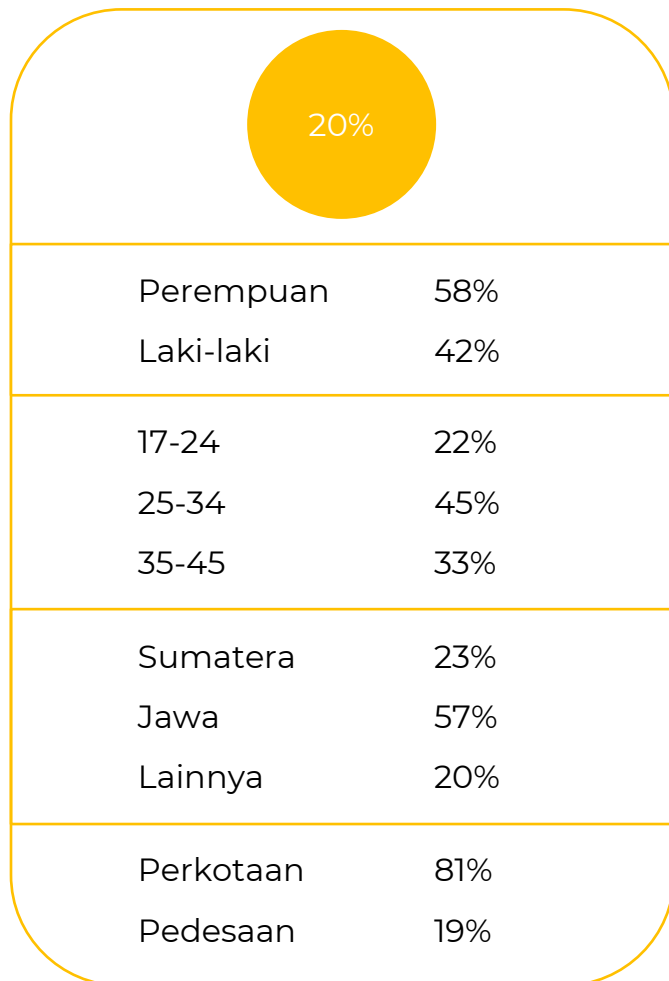
Isu lingkungan prioritas

base: cukup demokratis, n=75

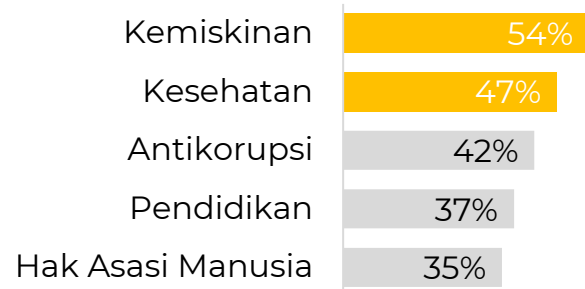
Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Perampasan hutan adat	35%
Kurangnya ruang terbuka hijau	27%
Cuaca ekstrem	26%
Proyek tambang yang merusak	25%
Banjir dan air rob	22%

Cukup Otoriter

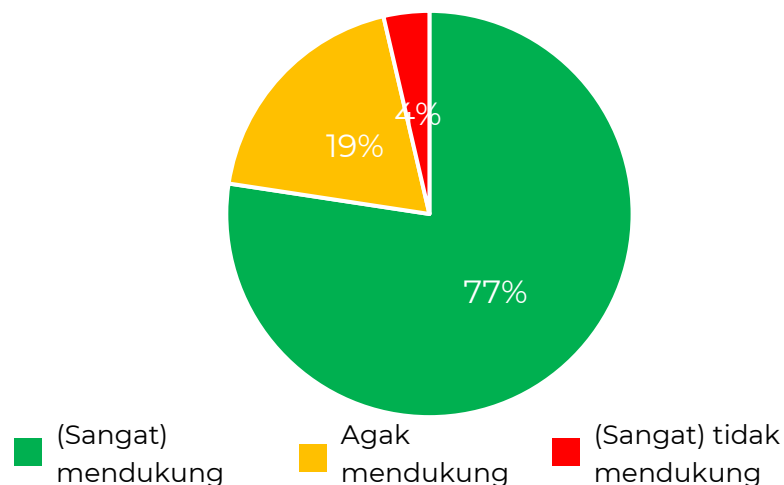
Demografi & profil cukup otoriter



Topik prioritas base: cukup otoriter, n=81



Mendukung aksi demonstrasi base: cukup otoriter, n=75



Isu prioritas base: cukup otoriter, n=81

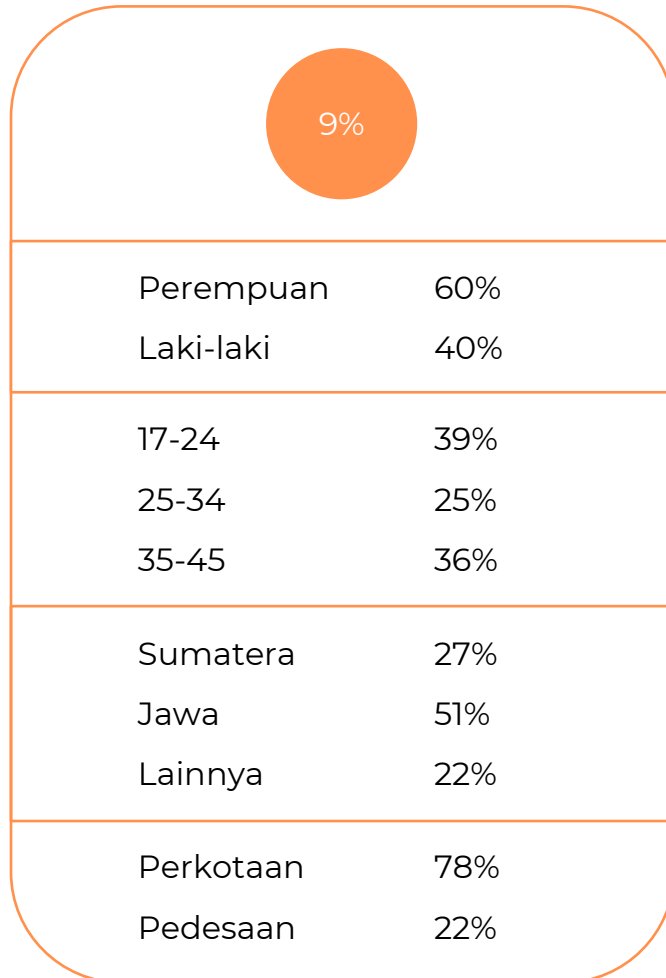
Isu yang perlu segera diselesaikan	
MBG tidak transparan	38%
Maraknya korupsi anggaran	35%
Pengangguran tinggi	33%
Harga bahan pokok mahal	32%
RUU wewenang aparat yang kuat	28%

Isu lingkungan prioritas base: cukup otoriter, n=81

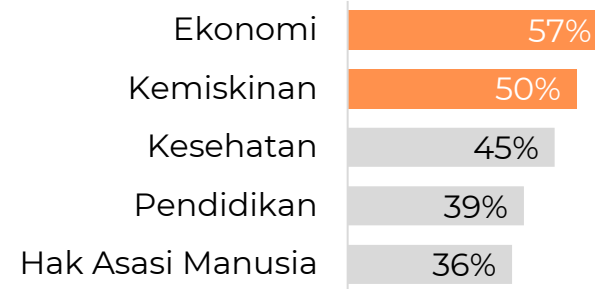
Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pengelolaan sampah tidak baik	31%
Proyek tambang yang merusak	29%
Kurangnya ruang terbuka hijau	27%
Banjir dan air rob	25%
Ahli fungsi lahan untuk pariwisata	25%

Otoriter

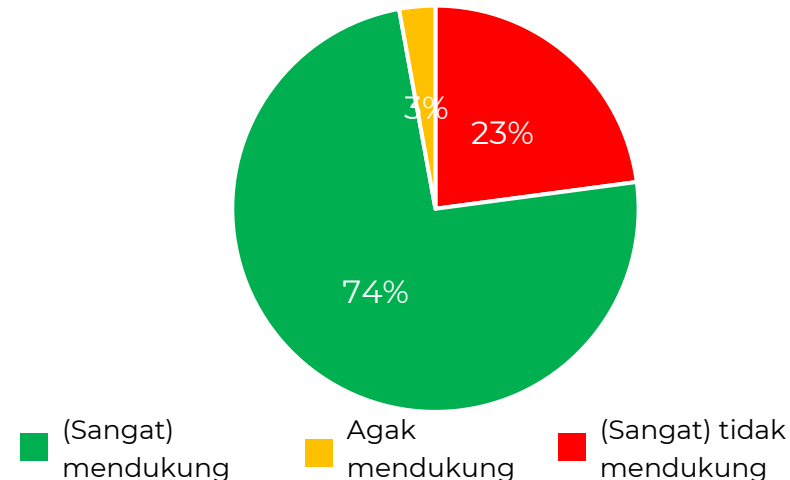
Demografi & profil otoriter



Topik prioritas base: otoriter, n=38



Mendukung aksi demonstrasi base: otoriter, n=38



Isu prioritas base: otoriter, n=38

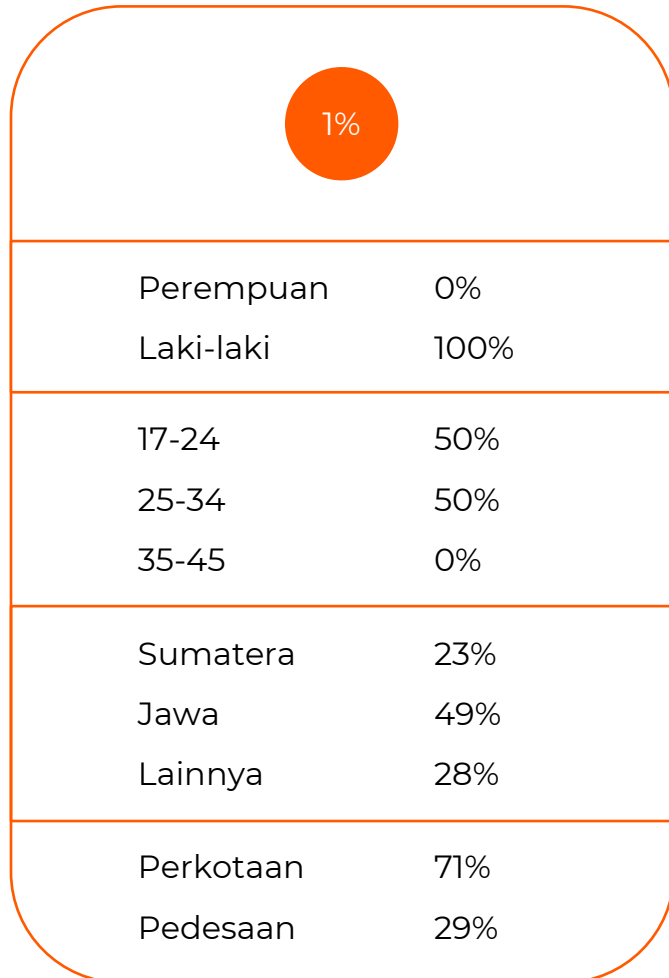
Isu yang perlu segera diselesaikan	
Biaya pendidikan mahal	43%
MBG tidak transparan	42%
Maraknya korupsi anggaran	39%
Pengangguran tinggi	39%
Upah pekerja tidak layak	37%

Isu lingkungan prioritas base: otoriter, n=38

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pengelolaan sampah tidak baik	21%
Hutan untuk perkebunan sawit	27%
Pencemaran air dan udara	25%
Banjir dan air rob	24%
Proyek tambang yang merusak	21%

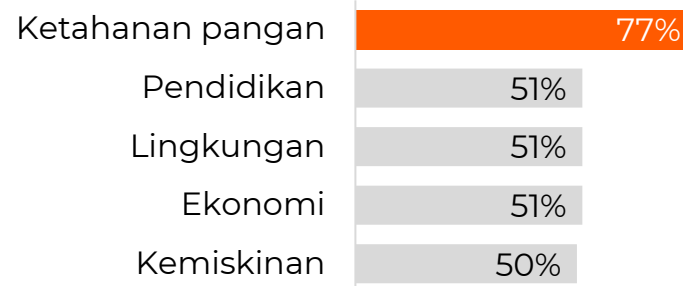
Sangat Otoriter

Demografi & profil sangat otoriter



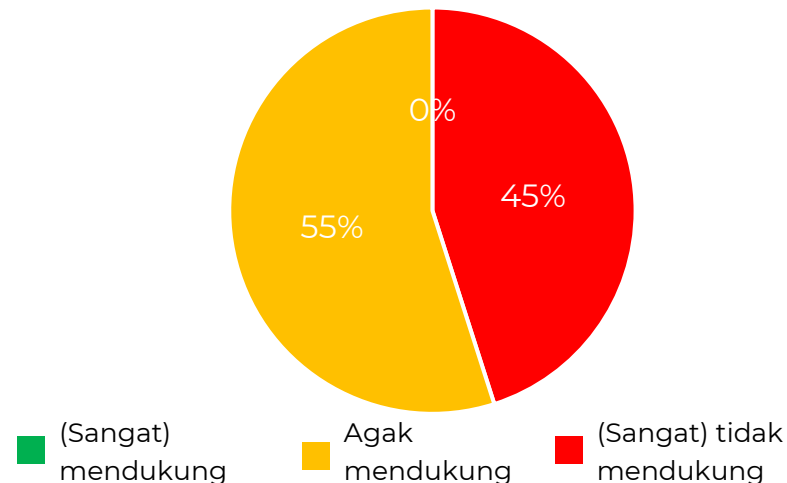
Topik prioritas

base: sangat otoriter, n=5



Mendukung aksi demonstrasi

base: sangat otoriter, n=2



Isu prioritas

base: sangat otoriter, n=5

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Upah pekerja tidak layak	78%
Harga bahan pokok mahal	73%
Maraknya korupsi anggaran	51%
RUU wewenang aparat yang kuat	51%
Keterlibatan militer	28%

Isu lingkungan prioritas

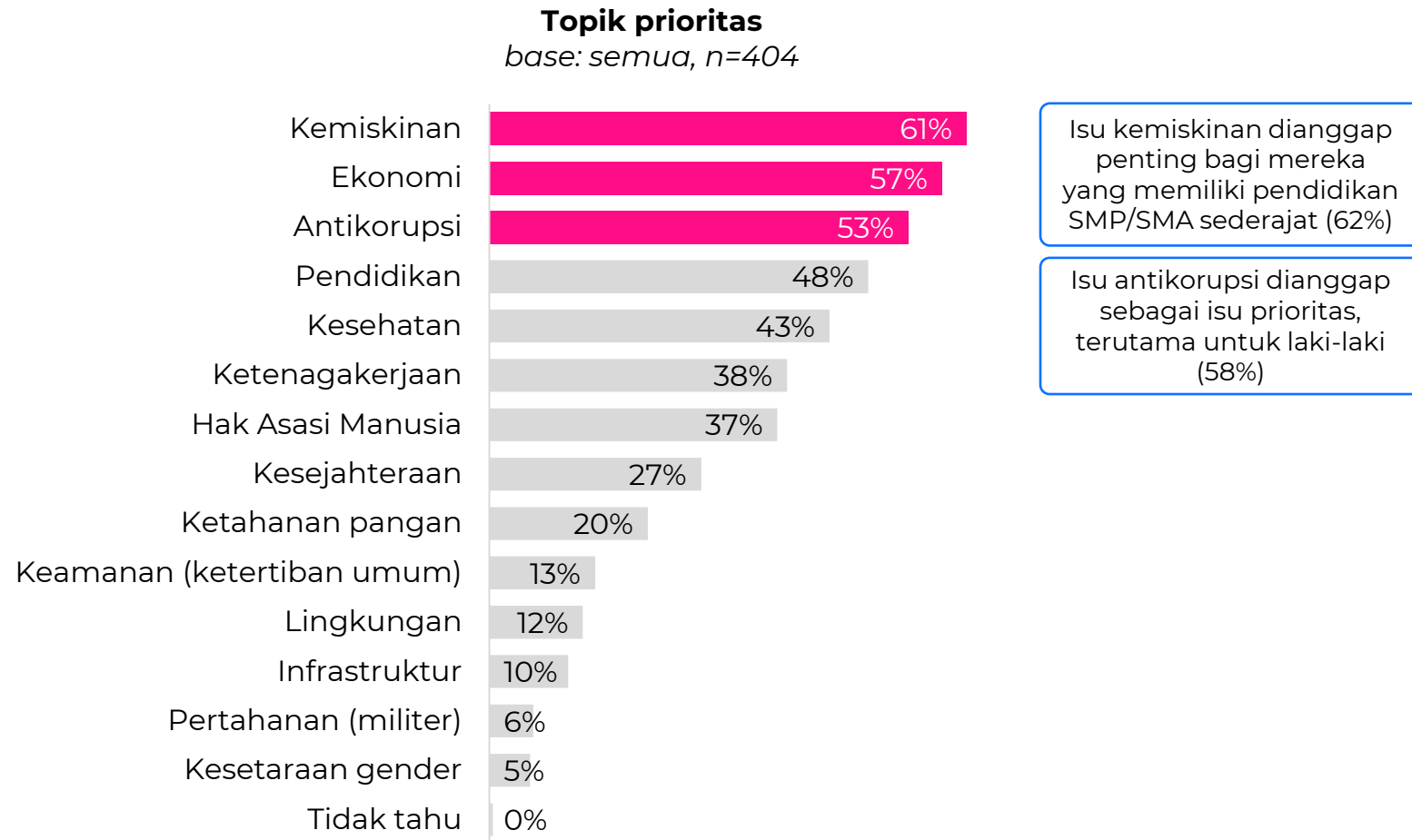
base: sangat otoriter, n=5

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Kepemilikan SDA pribadi	45%
Pencemaran air dan udara	27%
Proyek tambang yang merusak	23%
Perampasan hutan adat	23%
Ketergantungan energi fosil	22%



1 Isu Prioritas

Isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi masih dianggap sebagai topik prioritas oleh masyarakat.

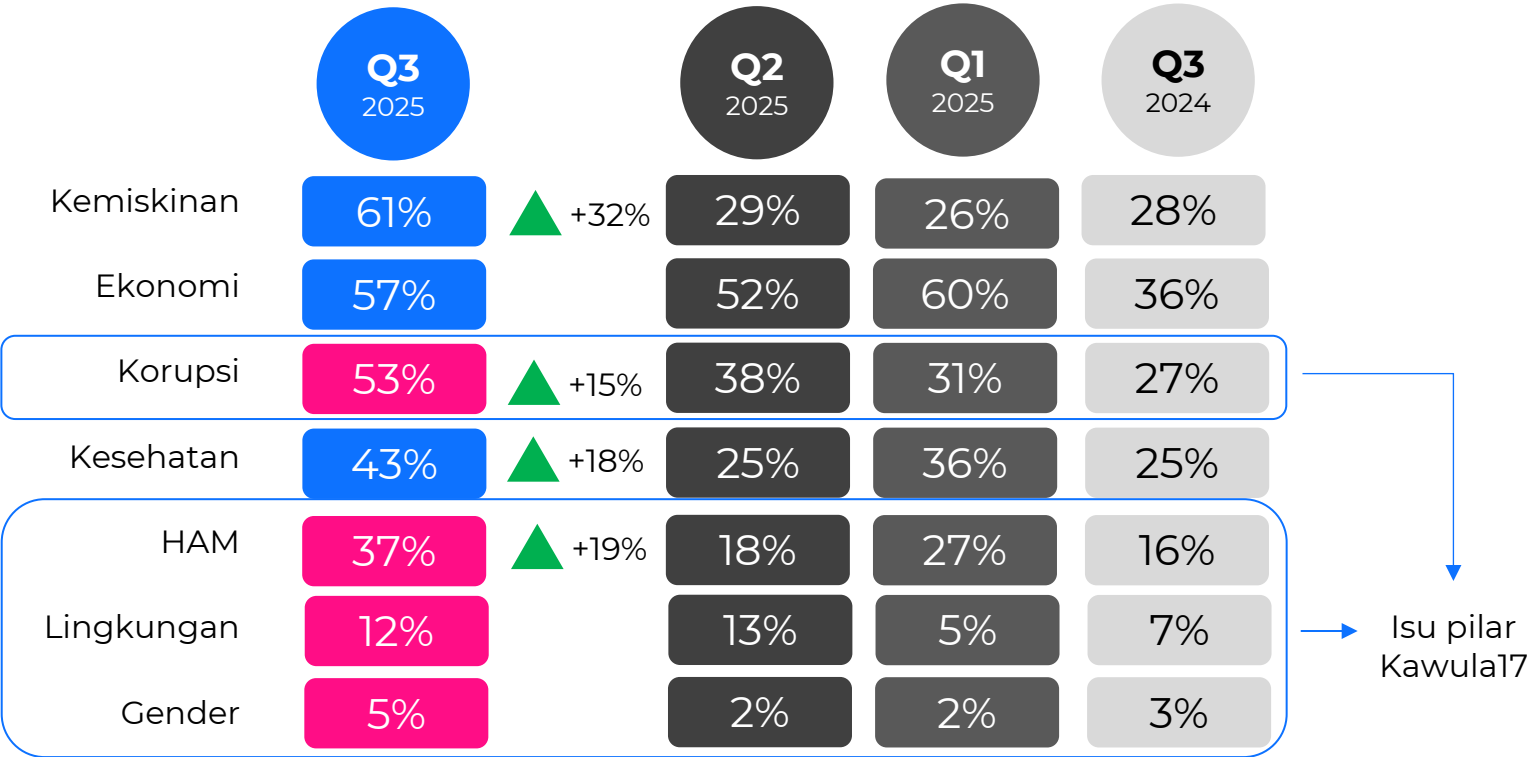


Dilihat dari tiga topik prioritas, isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kemiskinan (61%), ekonomi (57%), antikorupsi (53%) dianggap sangat penting oleh masyarakat saat ini. Mereka dengan tingkat pendidikan SMP/SMA sederajat (62%) secara signifikan menganggap isu kemiskinan sebagai prioritas.

Tiga topik ekonomi menjadi isu prioritas teratas dapat disebabkan oleh meningkatnya kemiskinan, melemahnya daya beli, dan terungkapnya berbagai kasus korupsi belakangan ini.

Isu kemiskinan secara konsisten melonjak (+32%) sejak tahun lalu (Q3 2024).

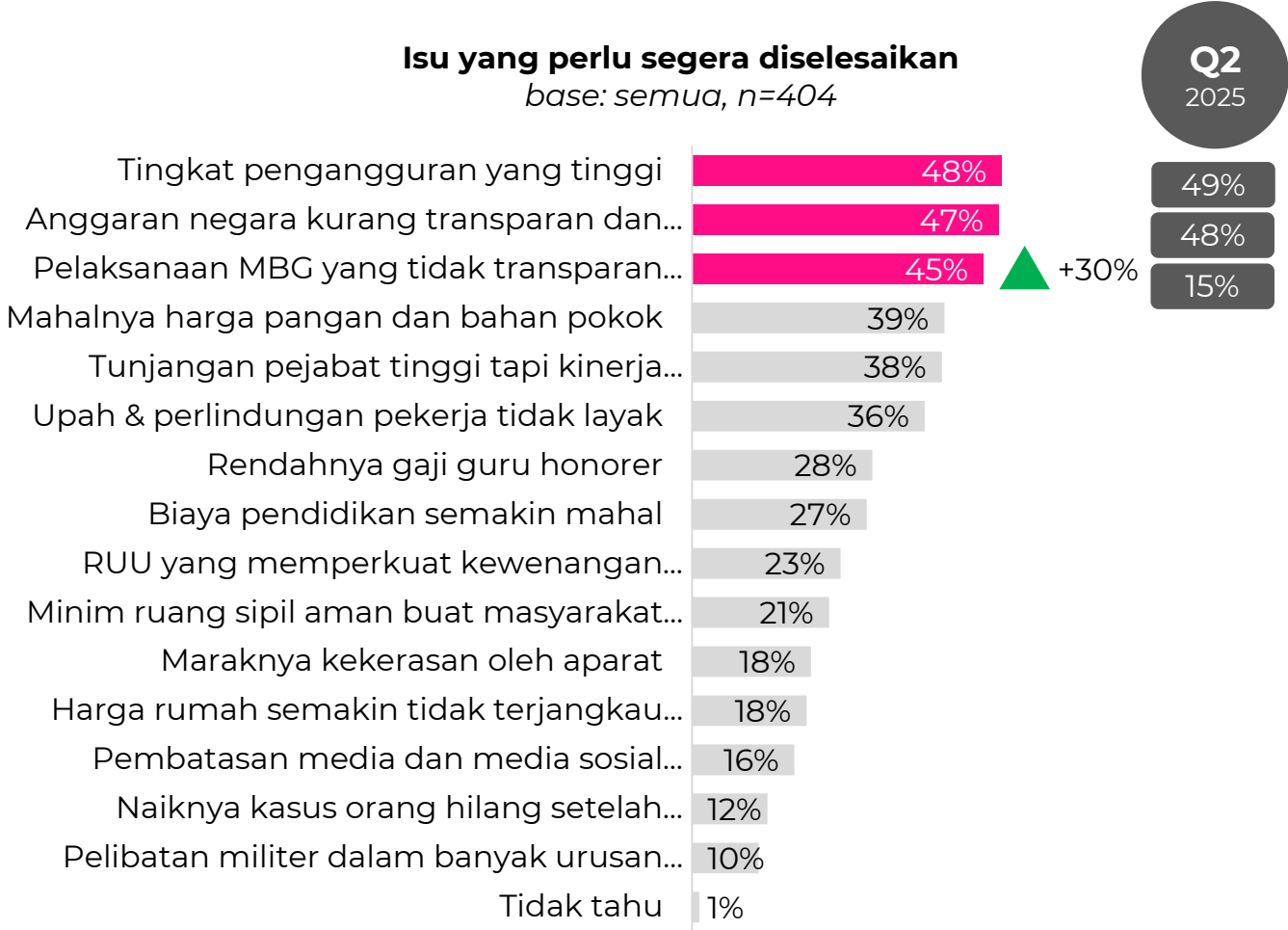
Topik prioritas
base: semua, n=404



Tingkat prioritas isu kemiskinan mencapai 61%, tertinggi di antara isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Dibandingkan kuartal sebelumnya, urgensi isu ini meningkat signifikan, dengan kenaikan persepsi prioritas sebesar 32% dari Q2.

Dari empat pilar isu Kawula17, Isu korupsi masih menjadi fokus utama, dengan gender konsisten jadi non-prioritas.

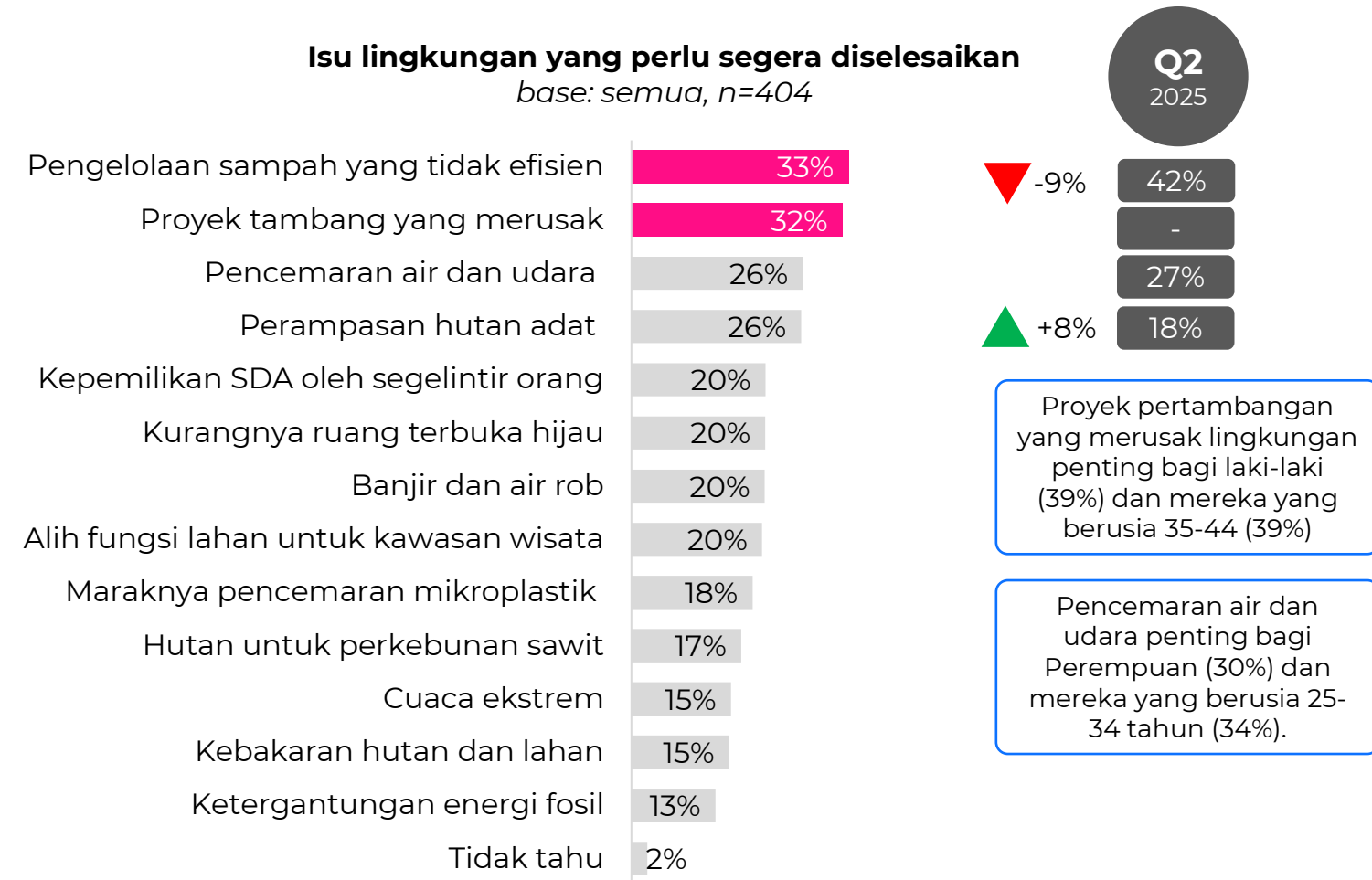
Pelaksanaan MBG (45%) menjadi isu non-ekonomi yang paling difokuskan agar segera diselesaikan oleh pemerintah.



Dari isu ekonomi yang saat ini menjadi kekhawatiran utama masyarakat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menonjol sebagai isu non-ekonomi yang dinilai perlu segera diselesaikan pemerintah.

Persepsi masyarakat terhadap buruknya pelaksanaan MBG juga meningkat signifikan sebagai isu yang perlu ditangani, meningkat +30% dibandingkan kuartal sebelumnya.

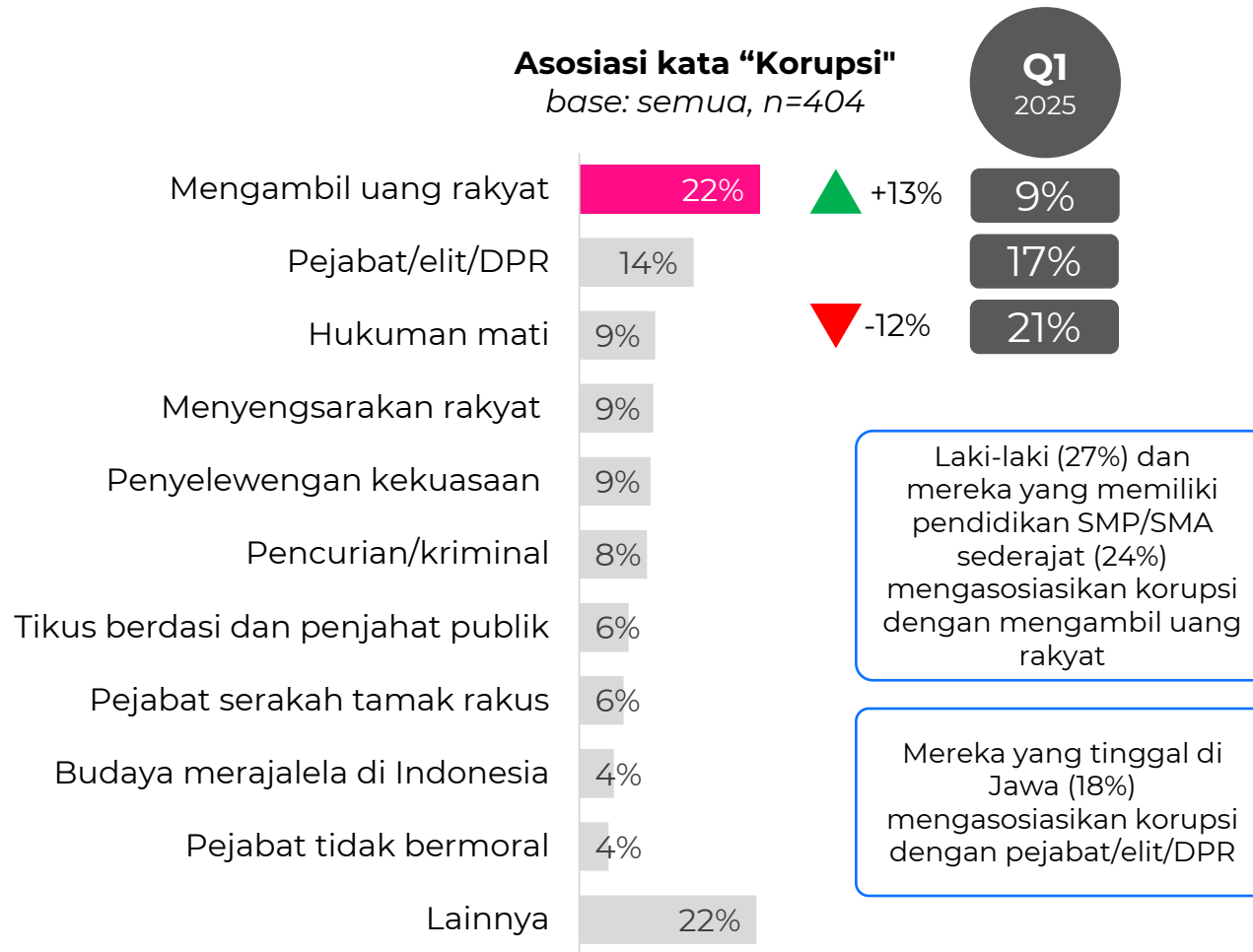
Masyarakat paling menyoroti masalah inefisiensi pengelolaan sampah (33%) dan kerusakan lingkungan akibat tambang (32%)



Pengelolaan sampah yang tidak efisien (33%) dan proyek pertambangan yang merusak lingkungan (32%) menjadi dua isu lingkungan utama yang dinilai masyarakat perlu segera ditangani. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu ini kemungkinan dipicu oleh maraknya pemberitaan tentang proyek yang merusak keberagaman alam Indonesia, seperti yang terjadi di Raja Ampat, Papua, yang memunculkan kampanye #SaveRajaAmpat di berbagai platform sosial media.

Sementara itu, isu perampasan hutan adat (26%) juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat prioritas masyarakat (+8%). Tren ini turut diperkuat oleh munculnya kampanye #SavePulauPadar yang menyoroti ancaman terhadap wilayah adat dan kawasan konservasi. Peningkatan perhatian terhadap kedua isu ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan ekosistem dan keadilan lingkungan di Indonesia.

Masyarakat paling banyak mengasosiasikan kata korupsi dengan mengambil uang rakyat (22%).



Asosiasi masyarakat dengan kata korupsi berbeda dengan Q1 dan Q2 2025. Pada kuartal ini, hanya 9% yang mengasosiasikan korupsi dengan hukuman mati. Jumlah ini menurun secara signifikan (-12%) dari Q2.

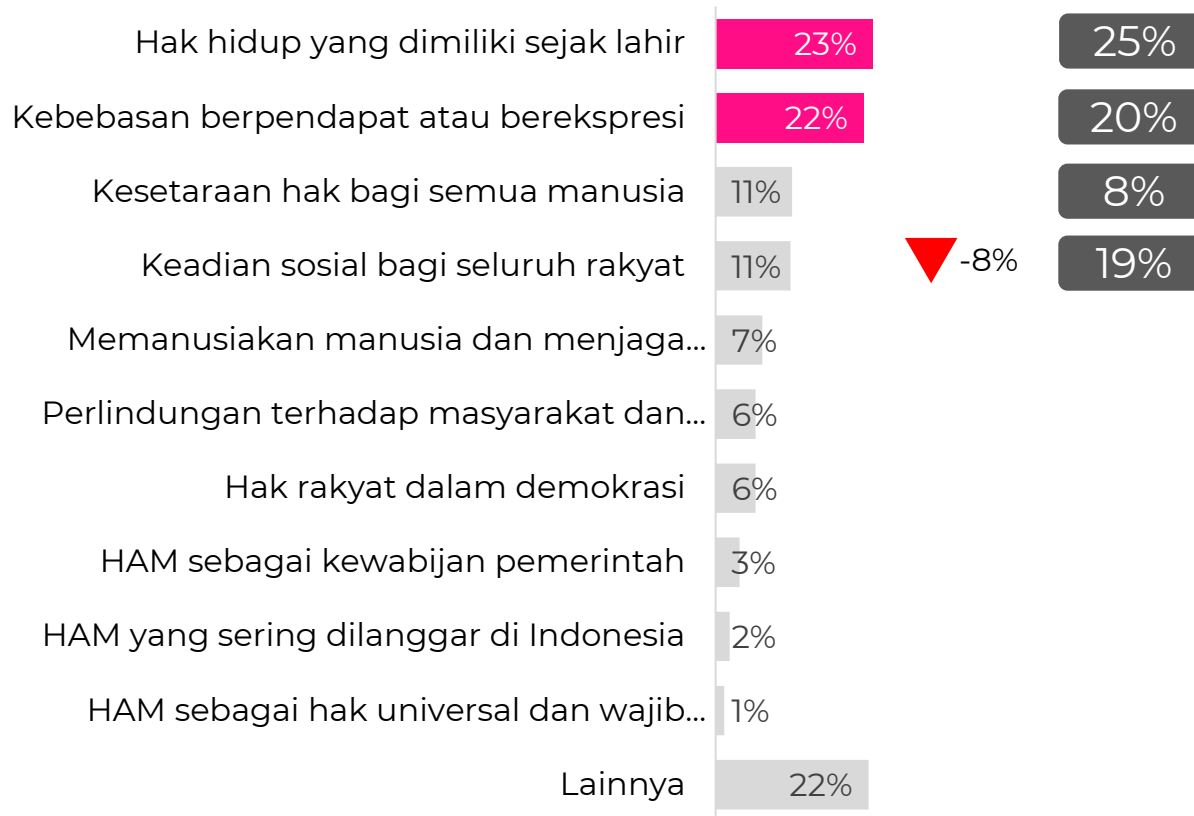
Menurunnya kaitan antara korupsi dan hukuman mati dapat mengindikasikan bahwa upaya edukasi untuk tidak mendorong hukuman mati pada kasus korupsi cukup berhasil. Masyarakat kini lebih menyoroti hal yang esensial, seperti uang rakyat yang diambil (22%) serta perilaku pejabat, elit, ataupun DPR yang korup (14%).

Hak hidup (23%) dan kebebasan berpendapat (22%) merupakan aspek yang paling dekat dengan hak asasi manusia.

Asosiasi kata "Hak Asasi Manusia"

base: semua, n=404

Q2
2025

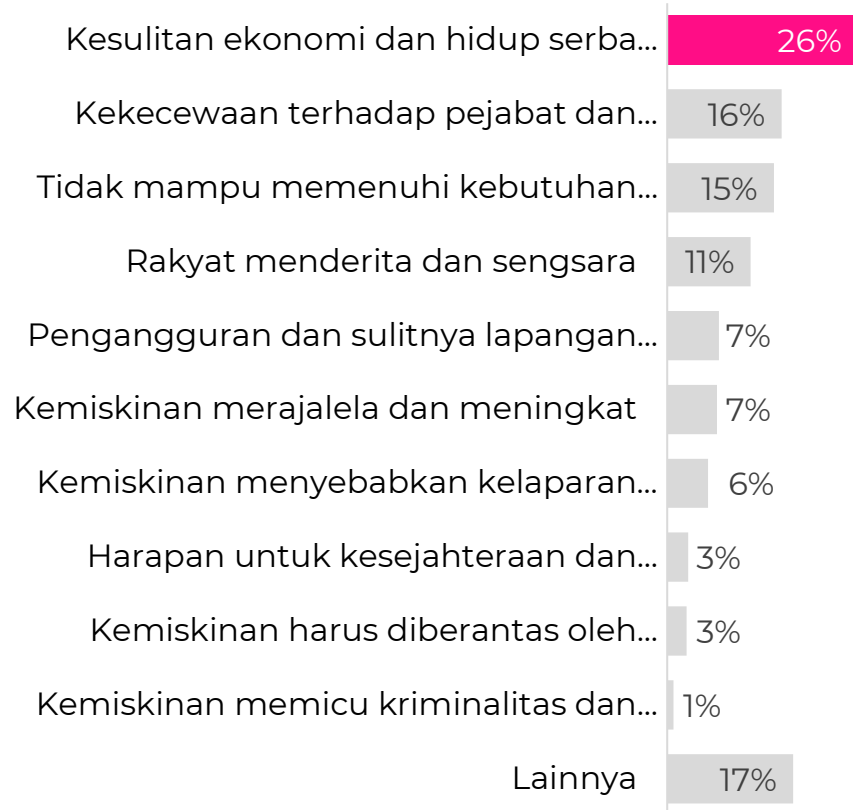


Asosiasi masyarakat terhadap kata hak asasi manusia tidak jauh dari hak hidup yang dimiliki sejak lahir (23%), kebebasan berpendapat atau berekspresi (22%), keadilan sosial (11%), dan kesetaraan hak bagi semua manusia (11%), yang pada dua kuartal terakhir menempati posisi empat teratas.

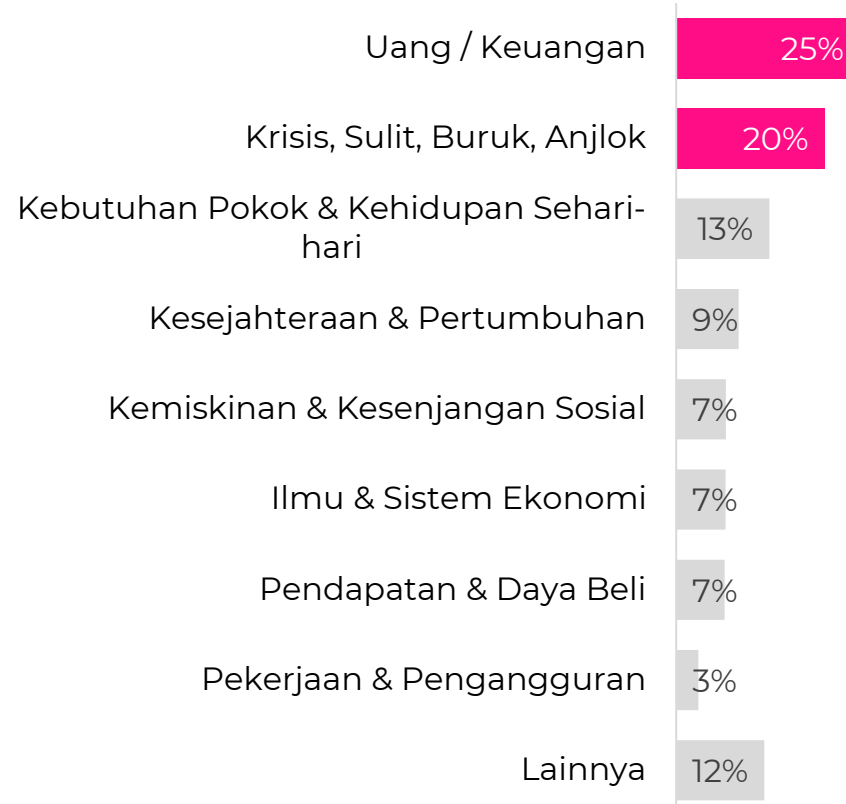
Menariknya, asosiasi terhadap keadilan sosial menurun signifikan (-8%) dibandingkan kuartal sebelumnya.

Kemiskinan dan ekonomi paling banyak terasosiasi secara negatif

Asosiasi kata "Kemiskinan"
base: semua, n=404



Asosiasi kata "Ekonomi"
base: semua, n=404



Asosiasi kata "ekonomi" menurut masyarakat adalah alat tukar menukar (uang/keuangan) (25%). Menariknya, mereka juga mengasosiasikan kata "ekonomi" dengan konotasi negatif, seperti krisis, sulit, buruk, anjlok (20%).

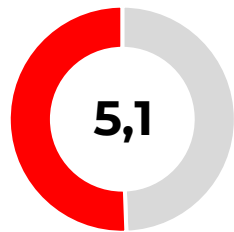
Selain itu, "kemiskinan" diasosiasikan dengan kesulitan ekonomi (26%) dan perasaan kecewa pada pejabat pemerintahan (16%). Konotasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai persoalan ekonomi saja, tetapi juga sebagai cerminan kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak.



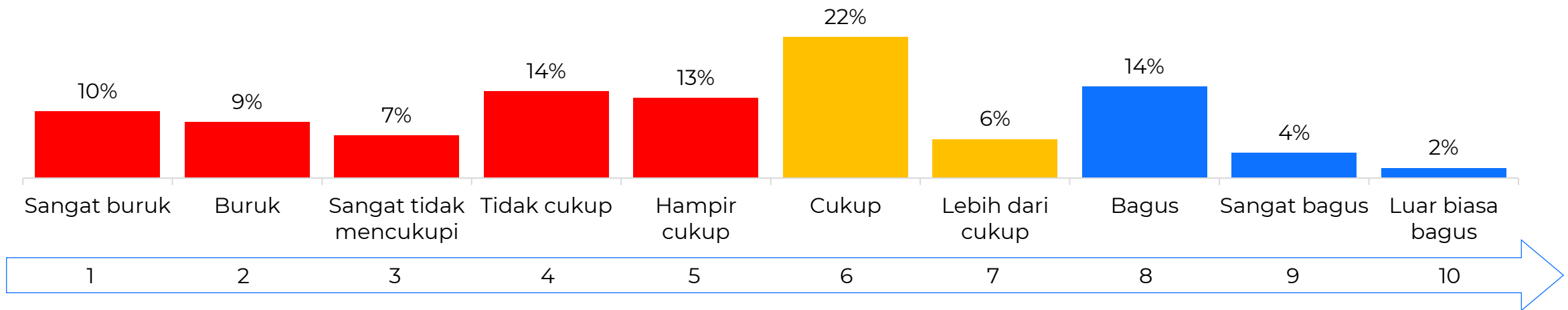
② Penilaian Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah pada Q3 2025 mendapatkan 5,1 poin.

**Skor Kinerja
Pemerintah Q3 2025**



Kinerja Pemerintah
base: semua, n=404

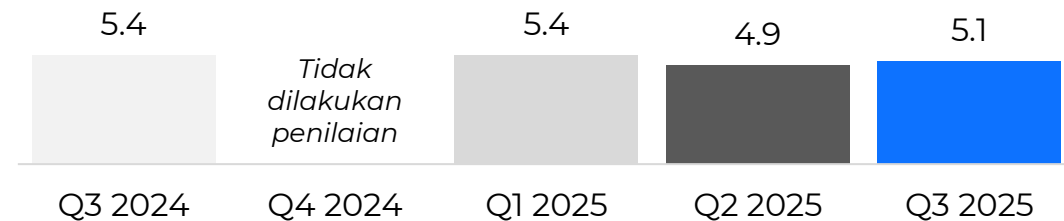


Kinerja pemerintah pada Q3 2025 mengalami tren penurunan sejak Q3 2024

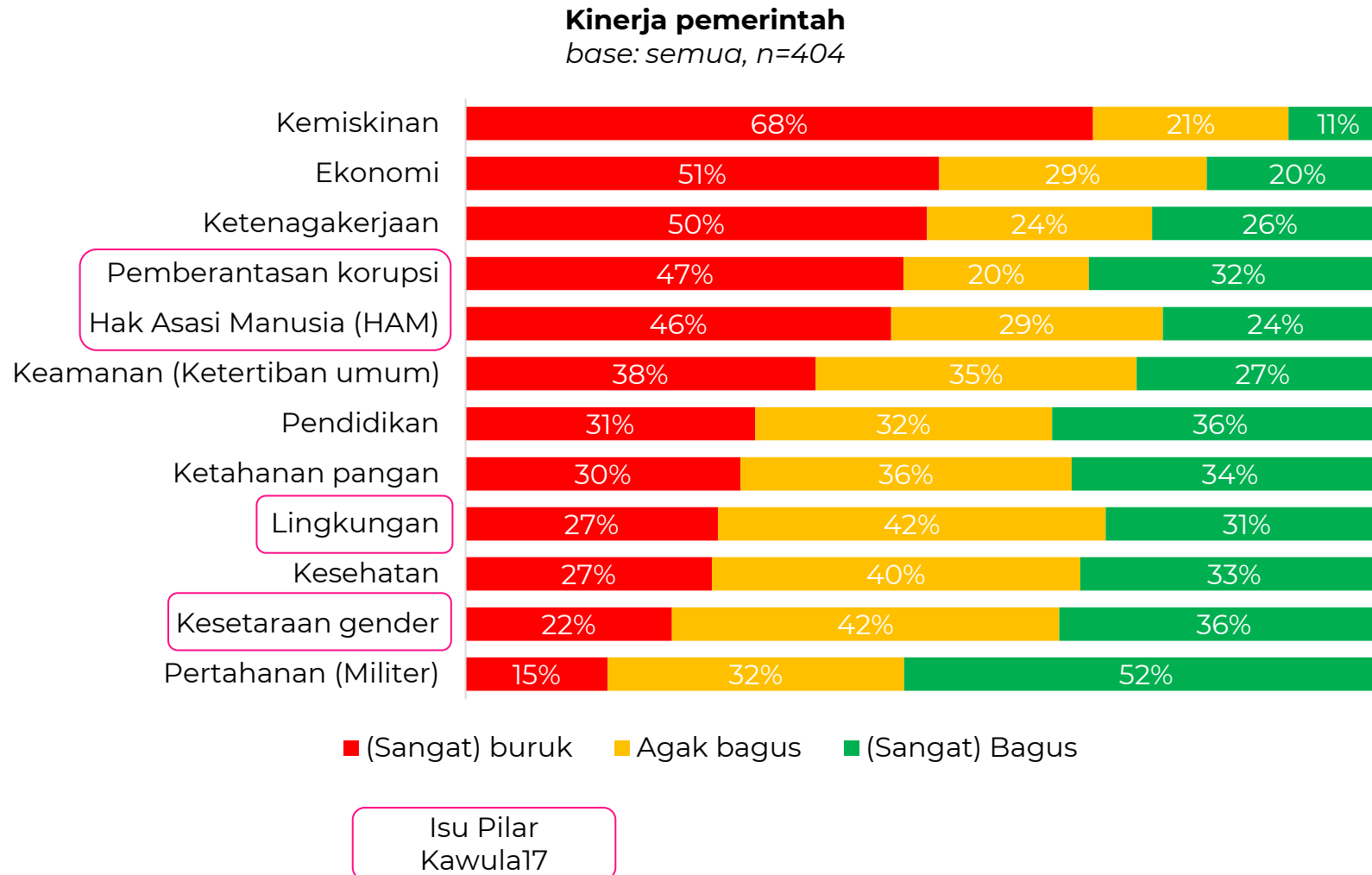
Pada Q3 2025, skor kinerja pemerintah mengalami sedikit kenaikan (+0,2 poin) dari Q2 2025. Namun, peningkatan ini belum cukup signifikan untuk menunjukkan perbaikan nyata.

Kenaikan tipis ini menunjukkan adanya pemulihan persepsi publik yang terbatas, terutama setelah periode sebelumnya menjadi titik terendah. Secara umum, masyarakat masih menilai kinerja pemerintah belum memuaskan, baik dari sisi penanganan isu ekonomi maupun tata kelola kebijakan publik.

Tren Kinerja Pemerintah
base: variasi



Kinerja pemerintah dalam topik yang bersangkutan dengan ekonomi mendapat penilaian buruk.



Kinerja pemerintah dalam topik pertahanan (militer) (52%), kesetaraan gender (36%), dan pendidikan (36%) dinilai positif.

Sayangnya, kinerja pemerintah dalam isu yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kemiskinan (68%), ekonomi (50%), ketenagakerjaan (50%), dan antikorupsi (47%), dinilai (sangat) buruk oleh masyarakat.

Meski terlihat mendapatkan persepsi skor yang baik, isu pertahanan (militer) belum menjadi topik prioritas bagi masyarakat.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja isu ekonomi, korupsi, dan HAM semakin memburuk.



NET Score*

	 Bottom 2	 Top 2					
Kemiskinan	68%	11%	-57%		-	-	-
Ekonomi	51%	20%	-32%	▲ +7%	-39%	-7%	-17%
Keternagakerjaan	50%	26%	-24%		-	-	-
Antikorupsi	47%	32%	-15%	▲ +7%	-22%	-49%	-87%
HAM	46%	24%	-22%	▼ -10%	-12%	-14%	-20%
Pendidikan	31%	36%	5%		1%	16%	14%
Gender	22%	36%	13%		10%	19%	-9%
Kesehatan	27%	33%	7%		5%	-15%	19%
Lingkungan	27%	31%	3%	▲ +9%	-6%	-5%	-8%

Penilaian kinerja pemerintah pada kemiskinan menjadi topik baru pada Q3 2025 mendapat perhatian publik dengan *NET Score* terendah (-57%), dan isu ketenagakerjaan (-24%) juga menempati posisi tiga teratas setelah isu ekonomi (-32%).

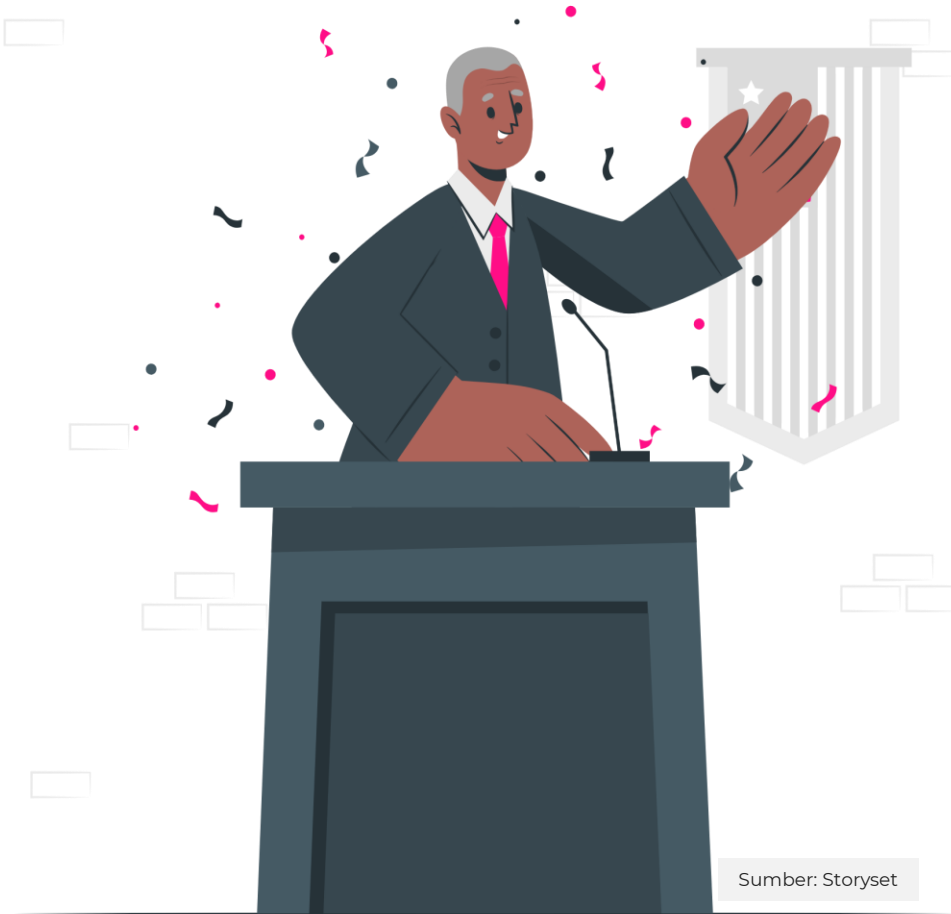
Meskipun, score korupsi meningkat posisinya masih dinilai negatif (-15%). *NET Score* HAM (turun 10%) menjadi temuan menarik, didorong dengan berbagai isu kriminalisasi yang terjadi sejak tiga bulan terakhir.

Tren untuk isu Pendidikan, gender, Kesehatan, dan lingkungan mengalami peningkatan *NET Score* yang cukup positif.

NET Score

NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).**



③ Ekspektasi terhadap Pemerintahan

Program *Quick Win* Pemerintah

Pemerintah menetapkan sejumlah program hasil terbaik cepat (*quick win*) di dalam dokumen visi misinya. Program-program tersebut adalah:

Makan Bergizi Gratis

Program ini merupakan inisiatif untuk menyediakan asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah dan pesantren yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif dan deteksi dini penyakit. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ketika ulang tahun, serta untuk anak sekolah dan ibu hamil

Food Estate

Program *food estate* adalah pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan tujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekolah Unggulan Garuda

Program ini merupakan inisiatif untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah berkualitas tinggi di berbagai daerah, yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pencetakan lulusan berdaya saing global.

Kartu Kesejahteraan Sosial

Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kartu ini akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial pemerintah, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga penyalurannya lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau langsung keluarga prasejahtera.

Menaikkan Gaji ASN

Kebijakan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Membangun Infrastruktur

Program membangun infrastruktur akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dasar yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur energi dan digital.

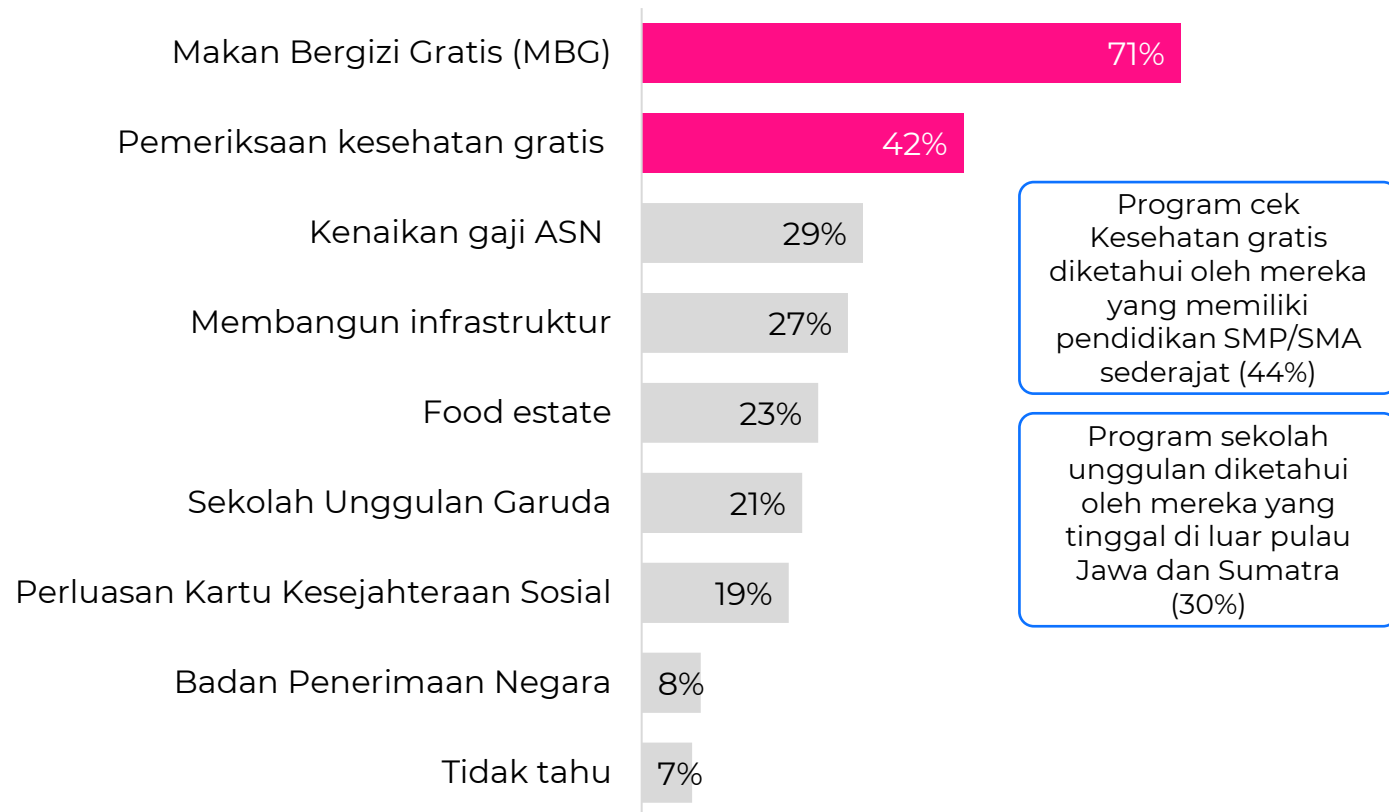
Badan Penerimaan Negara

Pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah langkah restrukturisasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Makan Bergizi Gratis (71%) masih menjadi program *quick win* pemerintah yang paling diketahui masyarakat.

Mengetahui Program Quick Win Pemerintah

base: semua, n=404



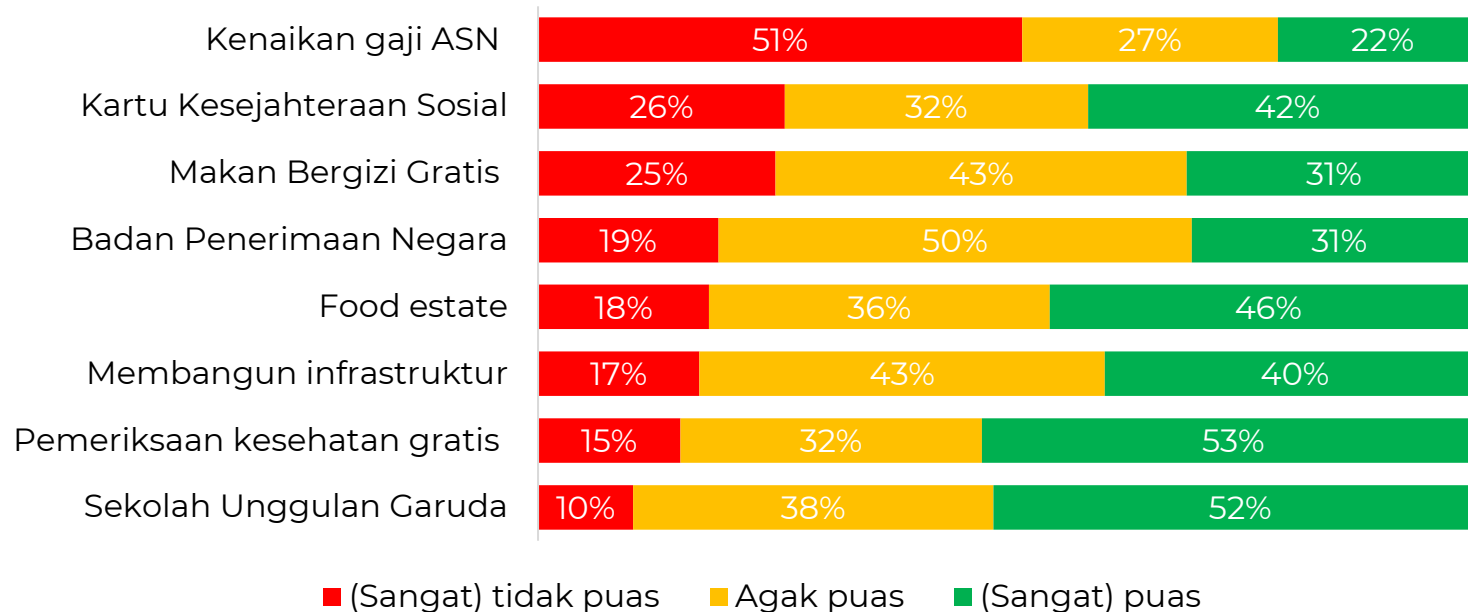
Program *quick win* pemerintah yang paling dikenal masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) (71%). Namun, mengingat masifnya pemberitaan mengenai program ini, tingkat pengetahuan tersebut sebenarnya tidak terlalu tinggi.

Masyarakat juga mengetahui program pemeriksaan gratis (42%), meningkat dari pengetahuan masyarakat atas program ini pada Q2 2025 (+14%). Hanya 7% yang menyatakan tidak tahu program *quick win* pemerintah sama sekali.

Program/kebijakan kenaikan gaji ASN (50%) menjadi kebijakan yang (sangat) tidak memuaskan bagi masyarakat.

Kepuasan Program Quick Win Pemerintah

base: semua, n=variasi



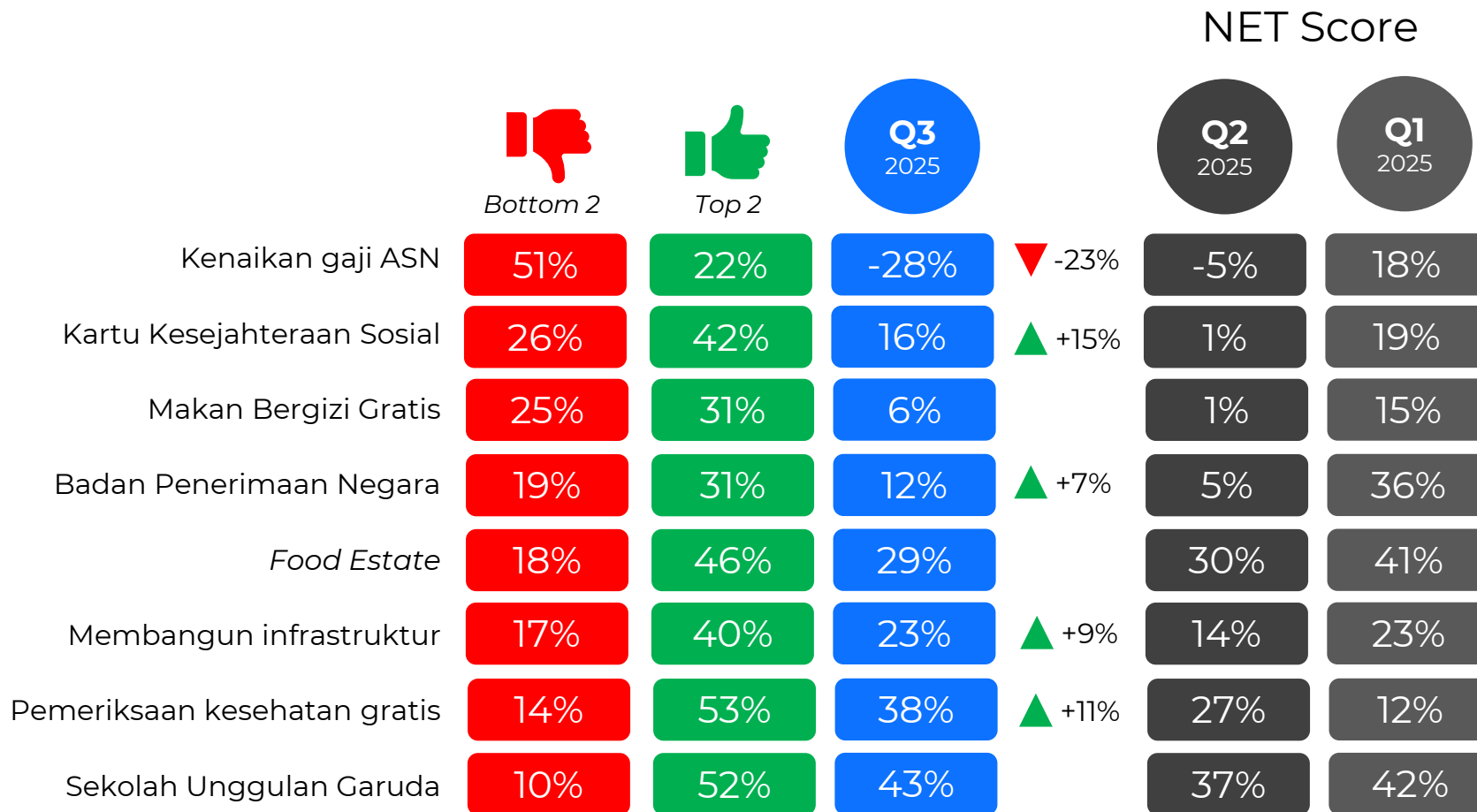
Mereka yang (sangat) puas dengan program Kartu Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berusia 25-34 tahun (59%)

Mereka yang agak puas dengan program MBG adalah mereka yang berusia 35-44 tahun (57%)

Tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan gaji ASN kemungkinan dipengaruhi oleh asosiasi antara kenaikan tunjangan ASN dengan tingginya gaji anggota DPR – isu yang menjadi pemantik gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Dibandingkan dengan MBG, program Kartu Kesejahteraan Sosial justru memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari masyarakat.

Kepuasan masyarakat atas kenaikan gaji ASN kian menurun apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.



Program kenaikan gaji ASN menjadi program dengan tingkat kepuasan terendah dan mengalami penurunan signifikan sejak Q2 (-23%).

Sementara itu, meskipun penurunan kepuasan terhadap program *food estate* tidak terlalu mencolok, program ini menunjukkan tren penurunan kepuasan setiap kuartal sejak Q1. Program MBG juga mengalami penurunan kepuasan sebesar 9% dibanding Q1.

Sementara itu, program Kartu Kesejahteraan Sosial mendapat penilaian (sangat) puas dari masyarakat, meningkat 15% dibanding Q2. Hal serupa terjadi pada program pemeriksaan kesehatan gratis, yang kepuasannya terus meningkat setiap kuartal sejak Q1.

Program terkini Pemerintah

Selain program *quick win* yang tercantum di dalam dokumen visi misi. Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan lainnya. Beberapa kebijakan tersebut yang ditelusuri pada survei ini adalah:

Efisiensi Anggaran

Program efisiensi anggaran pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan menekan pengeluaran dan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis. Namun, banyak sektor yang terganggu akibat efisiensi ini.

Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), merupakan sebuah badan pengelola investasi nasional yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk mengelola aset negara dan mengoptimalkan investasi pemerintah.

Program pendidikan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang hadir untuk memberi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak jalanan, dan kelompok rentan agar tetap mendapat hak dasarnya.

Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu, sekaligus menjadi upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pemerintah awasi Perusahaan teknologi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan akses tiga PSE privat karena belum mendaftar di Indonesia, termasuk satu perusahaan e-commerce besar asal AS.

Program 3 juta rumah subsidi

Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari misi pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan. Program ini meliputi pembangunan rumah baru, renovasi rumah tidak layak huni, serta penyediaan hunian di perkotaan, pedesaan, hingga pesisir.

Kenaikan tunjangan kinerja ASN Kementerian Keuangan

Kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk ASN Kemenkeu pada tahun 2025 telah diatur melalui Perpres, yang menetapkan besaran tunjangan kinerja, dengan nominal sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai.

Program terkini Pemerintah

Target penciptaan 19 juta lapangan kerja

Pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun, sebagai upaya untuk menjaga agar angka pengangguran tidak bertambah seiring dengan pertambahan rata-rata angkatan kerja baru.

Kenaikan pangkat anggota Polri

Presiden memberi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada anggota Polri yang terluka saat bertugas dalam aksi demonstrasi, sebagai penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan mereka menjalankan tugas.

Pembentukan Kementrian Haji & Umrah

Pembentukan kementerian baru ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan memfokuskan pengelolaan haji dan umrah ke dalam satu lembaga khusus, yang sebelumnya tersebar.

Pergantian Menteri (*reshuffle* kabinet)

Presiden Prabowo telah beberapa kali merombak Kabinet Merah Putih, termasuk mengganti sejumlah menteri dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Pemberian 330 ribu televisi pintar

Pemerintah menargetkan distribusi 330.000 Smart Digital Screen ke sekolah hingga akhir 2025 dengan anggaran Rp7,9 triliun untuk mendukung digitalisasi pendidikan

BBM impor Perusahaan swasta harus melalui Pertamina

Pemerintah menetapkan impor BBM satu pintu lewat Pertamina hingga akhir 2025 untuk mengatasi kelangkaan di SPBU swasta.

Negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat

Indonesia dan AS sepakat menunda tarif impor tinggi setelah negosiasi dagang berhasil menurunkannya dari rencana 32% ke sekitar 19%, sekaligus membuka kerja sama rantai pasok dan penghapusan hambatan non-tarif.

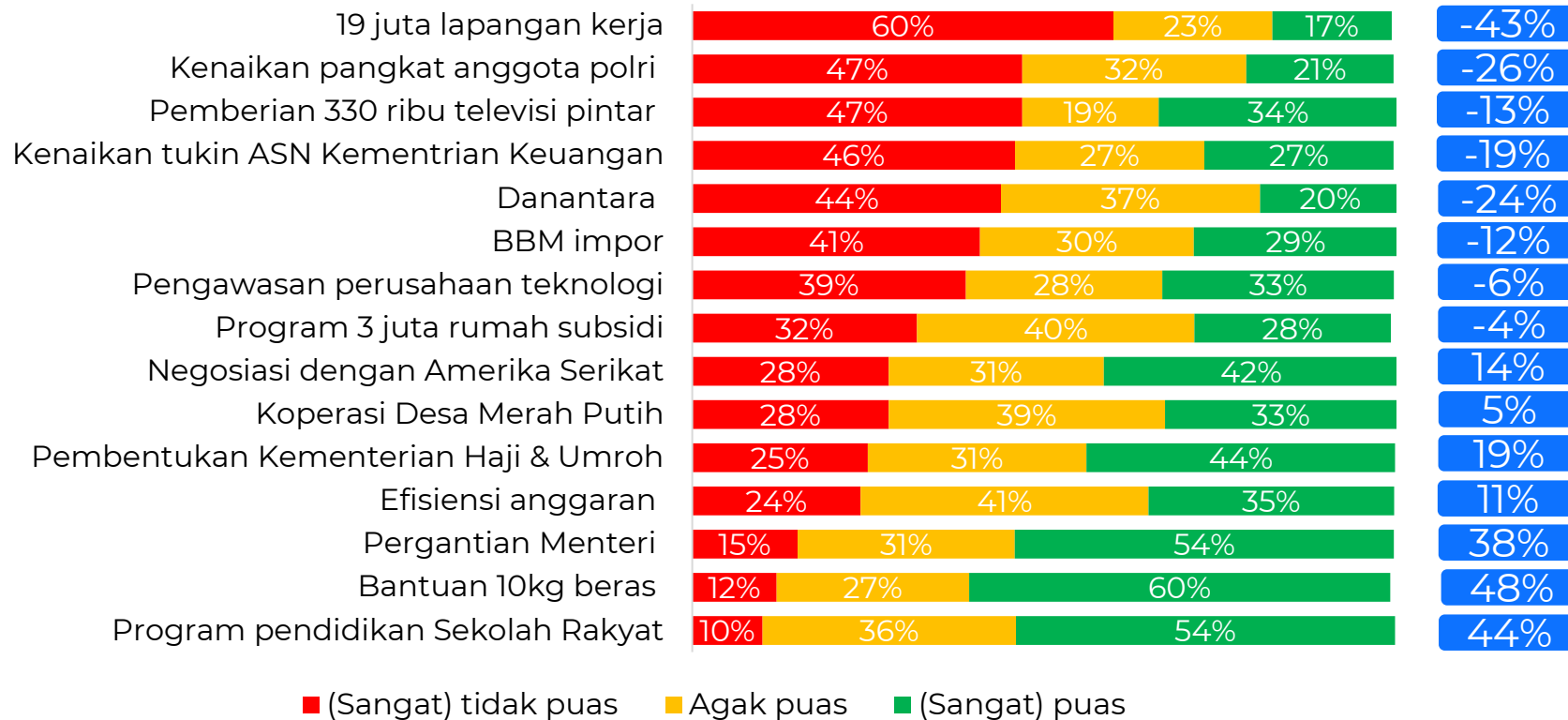
Bantuan 10kg beras

Pemerintah melanjutkan bantuan pangan beras untuk bulan Oktober dan November sebanyak 10kg untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 18,3 juta keluarga.

Sebagian besar masyarakat merasa (sangat) tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam merealisasikan 19 juta lapangan kerja.

Kepuasan Program Terkini Pemerintah

base: semua, n= variasi



Q3
2025

Sebagian besar masyarakat merasa (sangat) tidak puas dengan program 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan oleh pemerintah. Melihat isu kemiskinan dan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi isu prioritas bagi masyarakat, program ini dianggap belum berjalan sesuai harapan.

Selain itu, masyarakat juga merasa (sangat) tidak puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan pangkat anggota Polri terkait kinerja mereka selama demonstrasi (47%). Kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kekerasan yang dilakukan aparat selama gelombang protes dan demonstrasi akhir Agustus lalu.

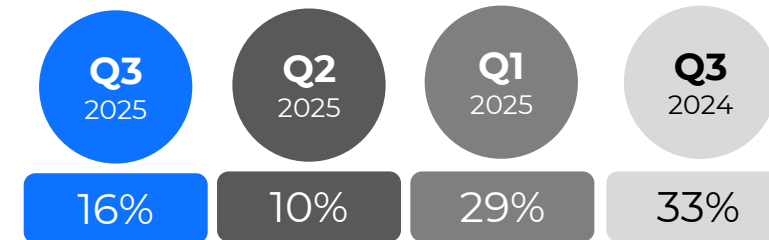
Pemberian 330 ribu *smart* TV (47%) dan kenaikan tunjangan kinerja ASN (46%) juga dianggap (sangat) tidak memuaskan.

NET score keyakinan masyarakat terhadap pemenuhan program pemerintah menurun -13% dibandingkan awal tahun ini.

Tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap program pemerintah saat ini sejalan dengan menurunnya keyakinan mereka terhadap pemenuhan janji pemerintah.

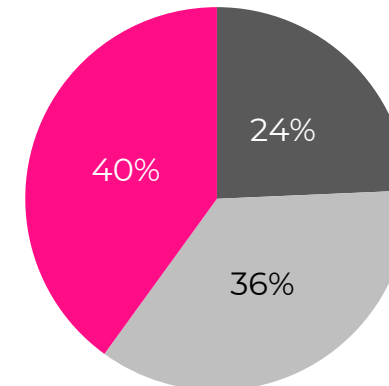
Meskipun terjadi sedikit peningkatan sebesar +6% dibandingkan NET score Q2 2025, tingkat keyakinan masyarakat pada kuartal ini tetap menurun signifikan sebesar -13% dibandingkan Q1 2025.

NET Score*



Keyakinan terhadap Pemerintah

base: semua, n=404

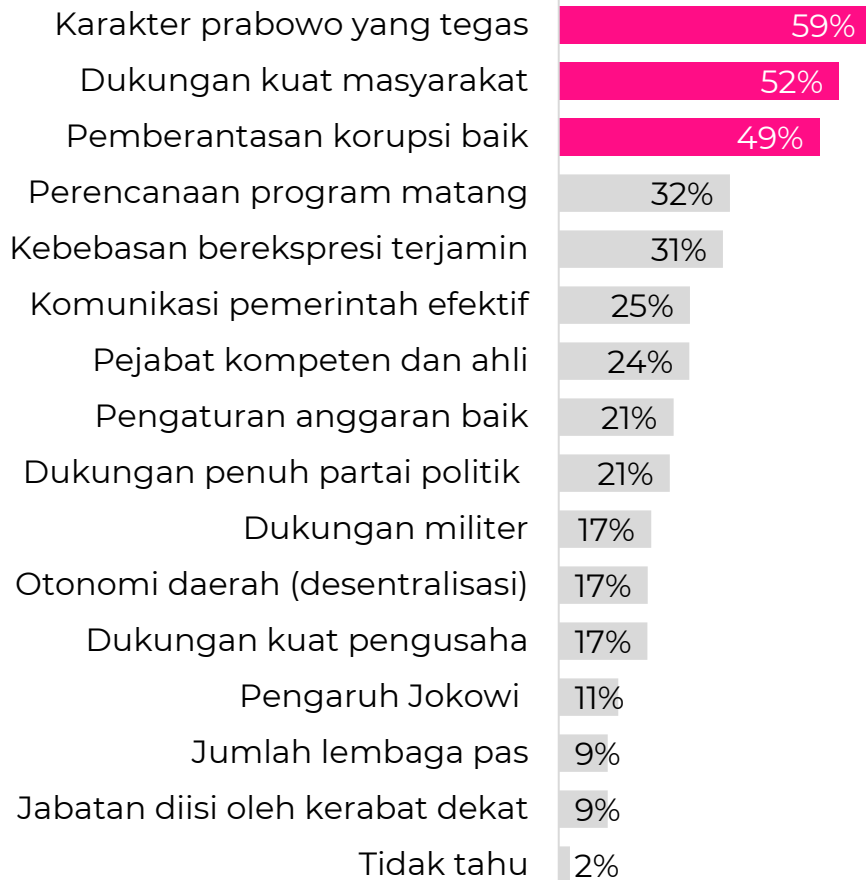


■ (Sangat) tidak yakin ■ Agak yakin ■ (Sangat) yakin

Karakter Prabowo menjadi faktor utama keyakinan masyarakat atas pemenuhan janji program pemerintahan.

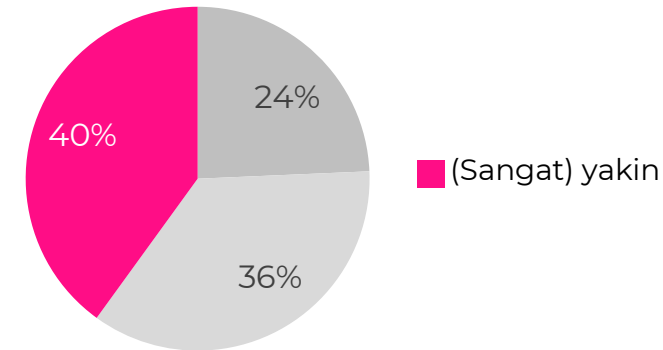
Alasan yakin pemerintah memenuhi janji

base: yakin dengan janji pemerintah, n=164



Keyakinan terhadap Pemerintah

base: semua, n=404



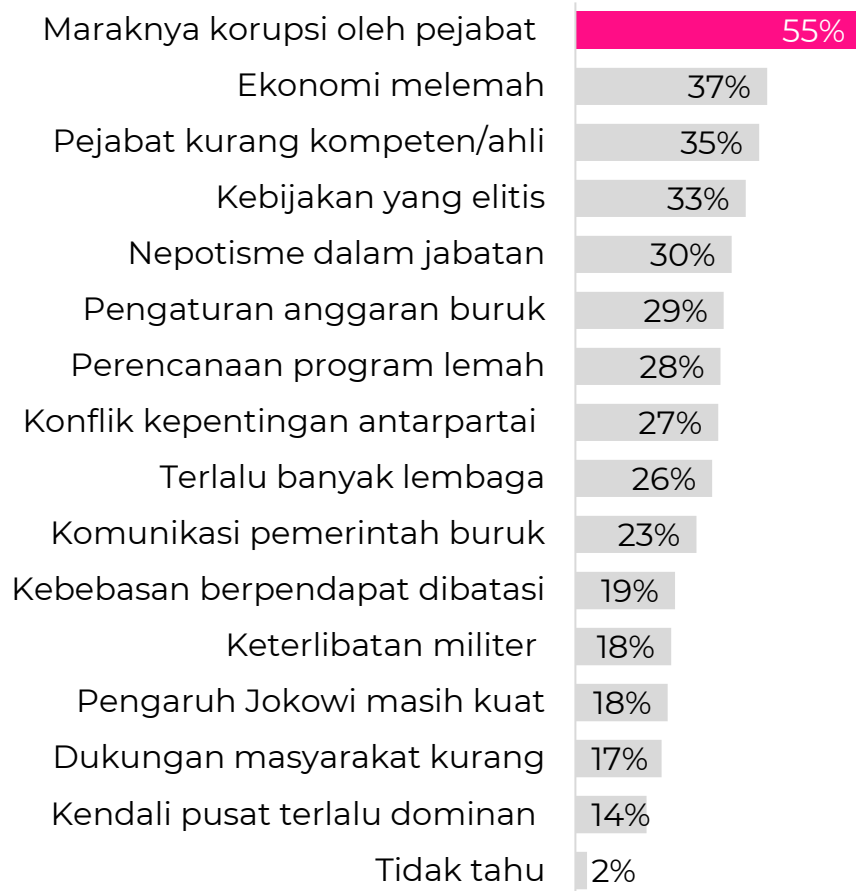
Masyarakat yang yakin bahwa pemerintah dapat memenuhi janji, beranggapan bahwa karakter Prabowo yang tegas (59%) menjadi faktor utama keberhasilan. Hal ini dapat disebabkan oleh munculnya tanggapan-tanggapan Prabowo terhadap berbagai isu.

Masyarakat juga yakin bahwa adanya dukungan masyarakat yang kuat (52%) dalam mendukung pemenuhan janji pemerintah. Selain itu, maraknya kasus korupsi yang kemudian terungkap (49%) pada pemerintahan saat ini menjadi salah satu faktor utama masyarakat yakin bahwa pemerintah mampu memenuhi janji.

Korupsi oleh pejabat pemerintahan (55%) jadi alasan utama masyarakat tidak yakin dengan pemenuhan janji pemerintah.

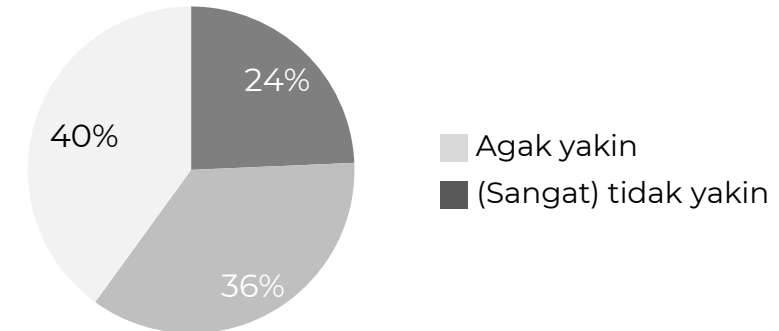
Alasan tidak yakin pemerintah memenuhi janji

base: tidak yakin dengan janji pemerintah, n=240



Keyakinan terhadap Pemerintah

base: semua, n=404



Meski pemberantasan korupsi menjadi hal utama yang membuat masyarakat yakin pemerintah dapat memenuhi janji, maraknya korupsi juga menjadi faktor utama masyarakat tidak yakin pemerintah dapat memenuhi janji.

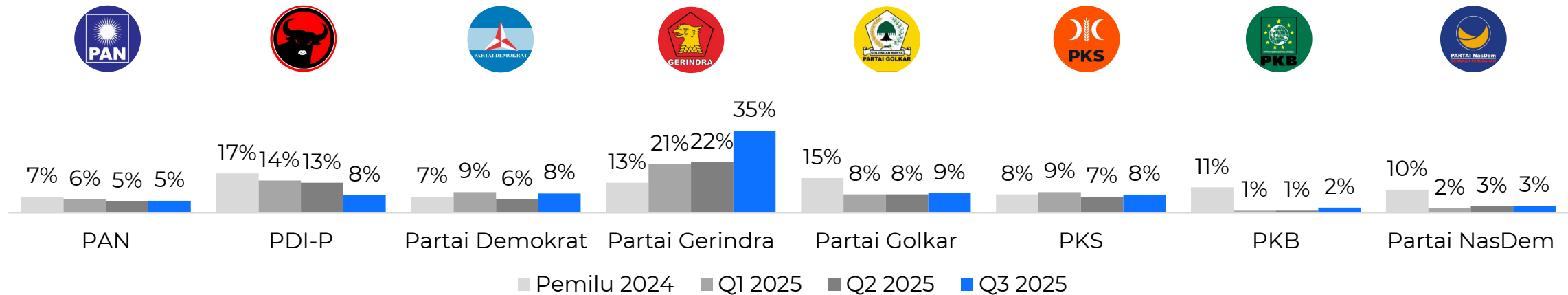
Selain korupsi, ekonomi yang melemah (37%) dan inkompetensi pejabat (35%) masuk sebagai alasan utama ketidakpercayaan masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan programnya dengan baik.



4 Pantauan Partai Politik

Peningkatan preferensi terhadap Partai Gerindra beriringan dengan penurunan jumlah suara bagi partai-partai lain.

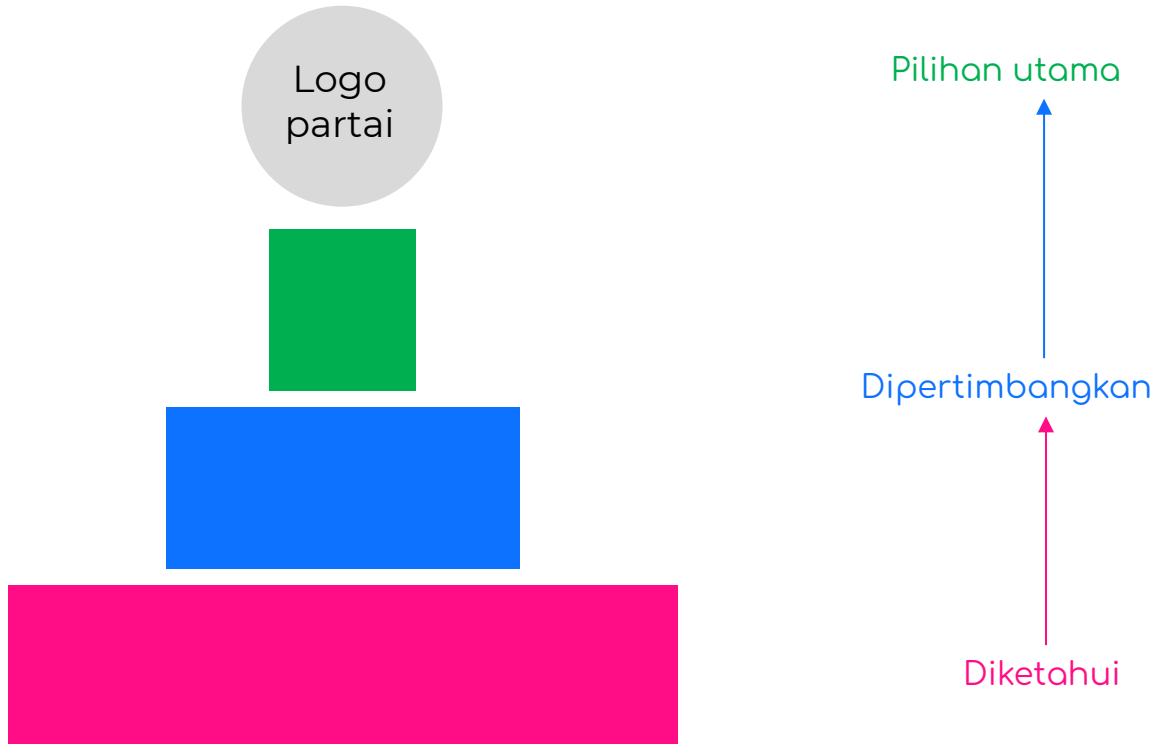
Preferensi Partai di Parlemen
base: semua, n=variasi



Gerindra secara konsisten mengalami peningkatan perbandingan suara, sedangkan PDIP mengalami penurunan dibandingkan dengan saat Pemilu 2024 dan dua kuartal sebelumnya, mungkin disebabkan oleh seiring berjalannya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang merupakan ketua umum Partai Gerindra.

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Cara membaca *funnel* partai politik



Persentase responden yang benar-benar memilih partai ini sebagai pilihan utama mereka. Responden yang bisa menjadikan partai tersebut sebagai pilihan utama hanya responden yang mempertimbangkan partai tersebut.

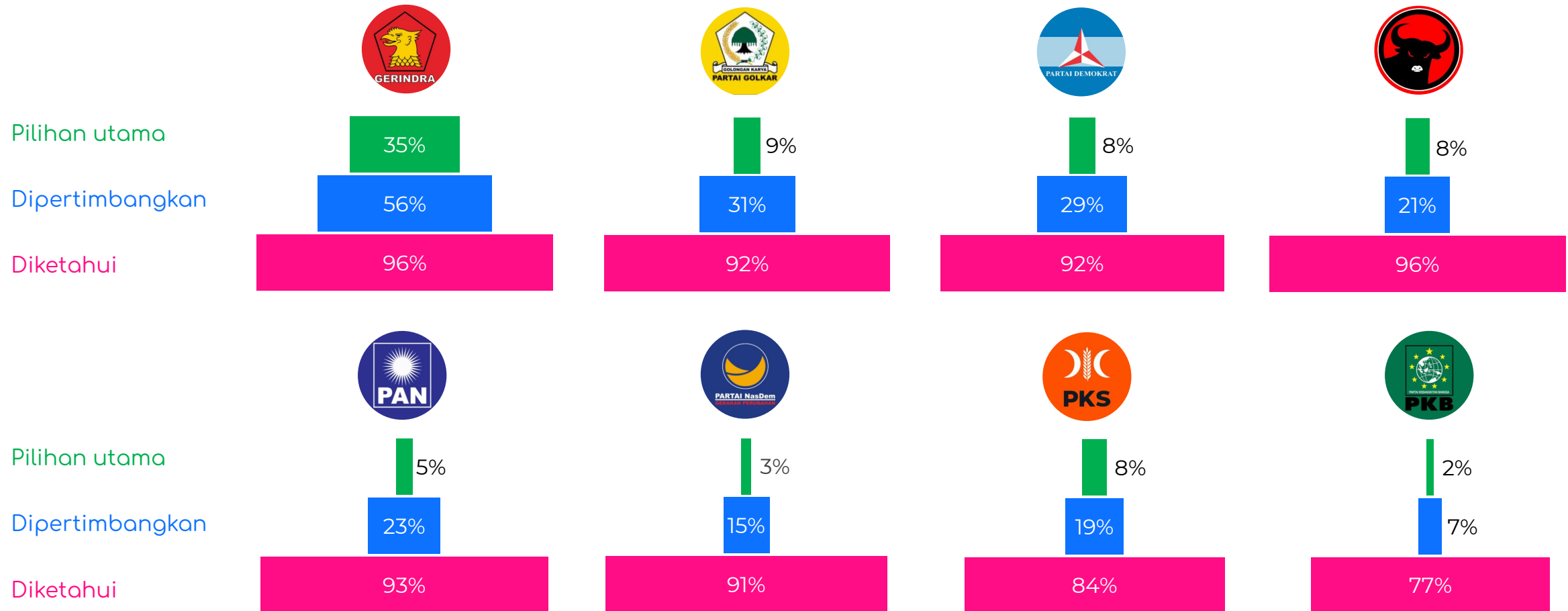
Persentase responden yang mempertimbangkan untuk memilih partai tersebut. Responden yang bisa mempertimbangkan partai tersebut hanya responden yang mengetahui partai tersebut.

Persentase responden yang mengenal partai ini, meskipun hanya sekadar tahu namanya. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin dikenal partai tersebut.

Jika Pemilu diadakan hari ini, Partai NasDem (3%) dan PKB (2%) tidak akan mendapatkan kursi di Senayan.

Pantauan Partai Politik Parlemen

base: semua, n=variasi



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

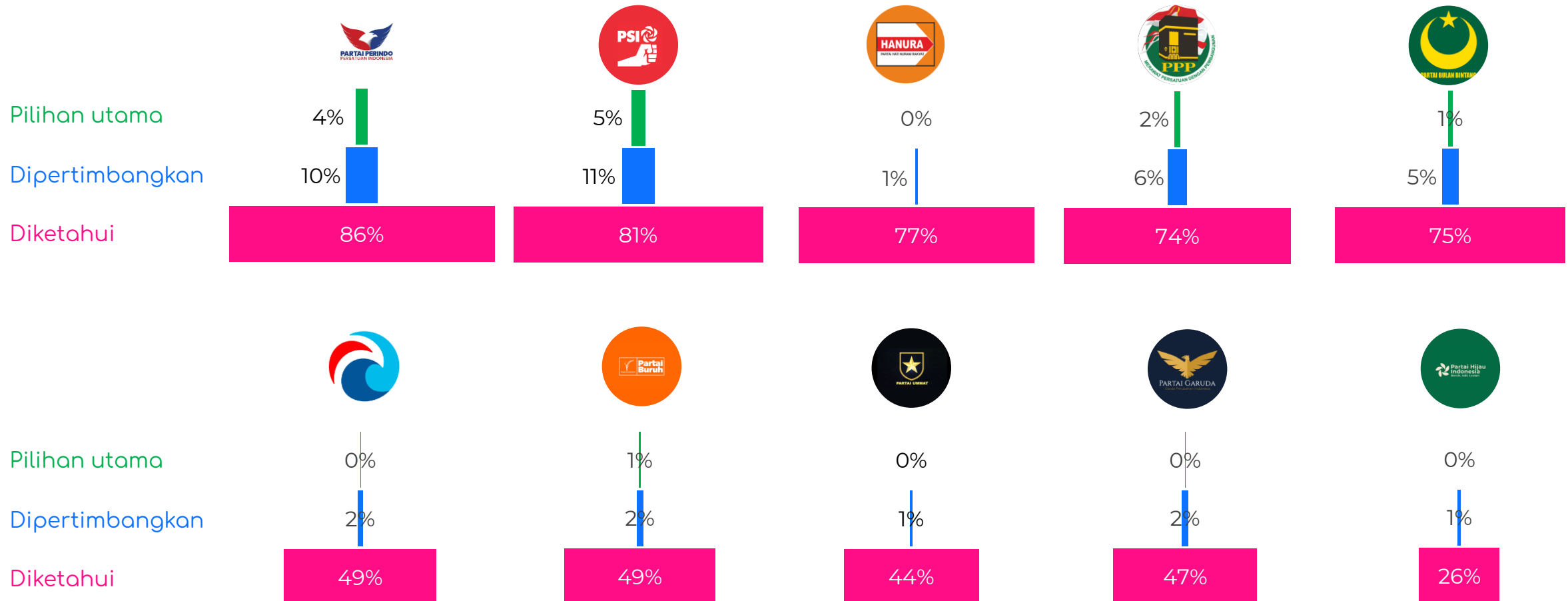
Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, PSI dan Perindo menjadi partai politik non-parlemen yang mungkin masuk ke DPR.

Pantauan Partai Politik Non-Parlemen

base: semua, n=variasi



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Preferensi Partai Politik per Kuartal

Perbandingan Preferensi Partai Politik

base: semua, n=variasi

Partai Politik	Diketahui			Dipertimbangkan			Pilihan Utama		
	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025
Partai Gerindra	96%	95%	95%	56%	42%	50%	35%	22%	21%
Partai Golkar	92%	93%	86%	31%	23%	22%	9%	8%	8%
Partai Demokrat	92%	90%	89%	29%	20%	22%	8%	6%	9%
PDIP	96%	88%	95%	21%	21%	30%	8%	13%	14%
PAN	93%	86%	91%	23%	17%	23%	5%	5%	6%
Partai NasDem	91%	84%	88%	15%	11%	17%	3%	3%	2%
PKS	84%	81%	78%	8%	16%	20%	8%	7%	9%
PKB	77%	78%	76%	2%	5%	12%	2%	1%	1%

Kenaikan signifikan
dari Q2 2025

Penurunan signifikan
dari Q2 2025

Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?



5 Opini Masyarakat dalam RUU Berjalan

Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik adalah sistem penilaian yang mengukur sejauh mana sikap partai politik selaras dengan preferensi masyarakat terhadap suatu isu. Skor diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian posisi partai dengan opini publik, di mana partai yang lebih selaras dengan mayoritas masyarakat mendapat skor lebih tinggi, sementara yang berseberangan mendapat skor lebih rendah.

Indeks Partai Politik pada NKS Q3 2025 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap RKUHAP, RUU Kehutanan, RUU BUMN, RUU Polri, RUU Pangan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Penjiaran.



PDIP (51,2) pada kuartal ini menjadi partai politik dengan sikap yang paling relevan dengan aspirasi masyarakat.

Indeks Partai Politik Parlemen

base: semua, n=404

Partai Politik	Skor Indeks Q3	Skor Indeks Q2	Skor Indeks Q1
Partai Demokrat	42,0	37,8	35,5
Partai NasDem	28,6	37,8	61,0
PKB	39,1	37,6	61,0
PDIP	51,2	36,5	28,9
Partai Golkar	31,2	36,5	31,1
PKS	47,6	35,5	61,1
Partai Gerindra	47,6	31,7	46,2
PAN	41,9	27,9	35,6

PDIP merupakan partai dengan skor indeks tertinggi di parlemen dengan skor 51,2. Tinggi skor PDIP Adalah refleksi dari posisi partai dalam beberapa RUU Prolegnas pada kuartal ini.

Indeks partai politik pada kuartal ini lebih bervariasi dibandingkan Q2 2025.

Rancangan Undang-Undang Prolegnas

Setiap undang-undang yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu melalui proses atau tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Proses pembentukan tersebut dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sendiri merupakan daftar rencana pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun berdasarkan program pembangunan nasional. Prolegnas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Prolegnas Prioritas Tahunan dan Prolegnas Jangka Menengah.

Prolegnas menjadi acuan untuk daftar undang-undang yang akan dibahas dalam satu tahun atau lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pembahasan undang-undang yang berjalan dalam satu dan lima tahun ke depan akan merujuk pada daftar yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.

Meskipun pembahasan undang-undang harus mengacu pada daftar yang telah disepakati dalam Prolegnas. Namun, terdapat pengecualian untuk bisa memasukkan undang-undang yang dianggap *urgent* di luar daftar Prolegnas, sebagaimana Pasal 23 ayat (2) UU P3.

Dalam penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dan Jangka Menengah, harus disertai dengan adanya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang, sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Setiap proses pembahasan rancangan undang-undang Prolegnas ini juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

3 dari 5 orang menolak penguatan kewenangan aparat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.



Kewenangan aparat perlu diperkuat agar penegakan hukum bisa berjalan lebih cepat dan tegas, meski tanpa sistem pengawasan yang jelas

Netral

Kewenangan aparat harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah upaya pembaruan KUHAP yang sudah tua, bertujuan menyempurnakan prosedur penegakan hukum di Indonesia. Namun, pembahasannya masih diwarnai pro-kontra:

- Pembatasan Hak Tersangka/Terdakwa:** Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi pembatasan hak bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, terutama di tahap awal proses.
- Kewenangan Penahanan dan Penyadapan:** RKUHAP juga menjadi sorotan terkait perluasan kewenangan penahanan tanpa persetujuan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, serta aturan penyadapan yang dianggap masih abu-abu dan berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat.

RKUHP diharapkan membawa perbaikan signifikan dalam sistem peradilan pidana, namun kontroversi seputar hak asasi, pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan besar dalam proses penyusunannya.

Sebagian besar masyarakat menekankan perlindungan hutan dari kerusakan, serta memperkuat keterlibatan Masyarakat Adat dan komunitas lokal.



Hanya negara dan pemerintah yang berhak melindungi hutan, sehingga tidak boleh ada yang menghalangi upaya pemerintah

Netral

Hutan harus dilindungi dari kerusakan dengan melibatkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal

RUU Kehutanan adalah inisiatif legislasi penting yang bertujuan untuk merevisi atau mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi UU Kehutanan didesak untuk mengubah paradigma kehutanan dari eksploitasi ekonomi menjadi keadilan ekologis dan pengakuan hak masyarakat adat.

1. **Pengakuan Hak Masyarakat & Tata Kelola:** menuntut pengakuan Hutan Adat sebagai status tersendiri, memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat, serta mendorong desentralisasi kewenangan dengan melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal.
2. **Perlindungan Ekologis & Penegakan Hukum:** RUU menegaskan kewajiban menjaga luas hutan minimal 30%, mengadopsi prinsip kehati-hatian (FPIC), melarang konversi besar-besaran, serta menolak pelemahan penegakan hukum melalui sanksi administratif semata.

Mayoritas masyarakat menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas terhadap kerugian negara oleh BUMN.



Kerugian BUMN adalah risiko usaha, bukan kerugian negara

Netral

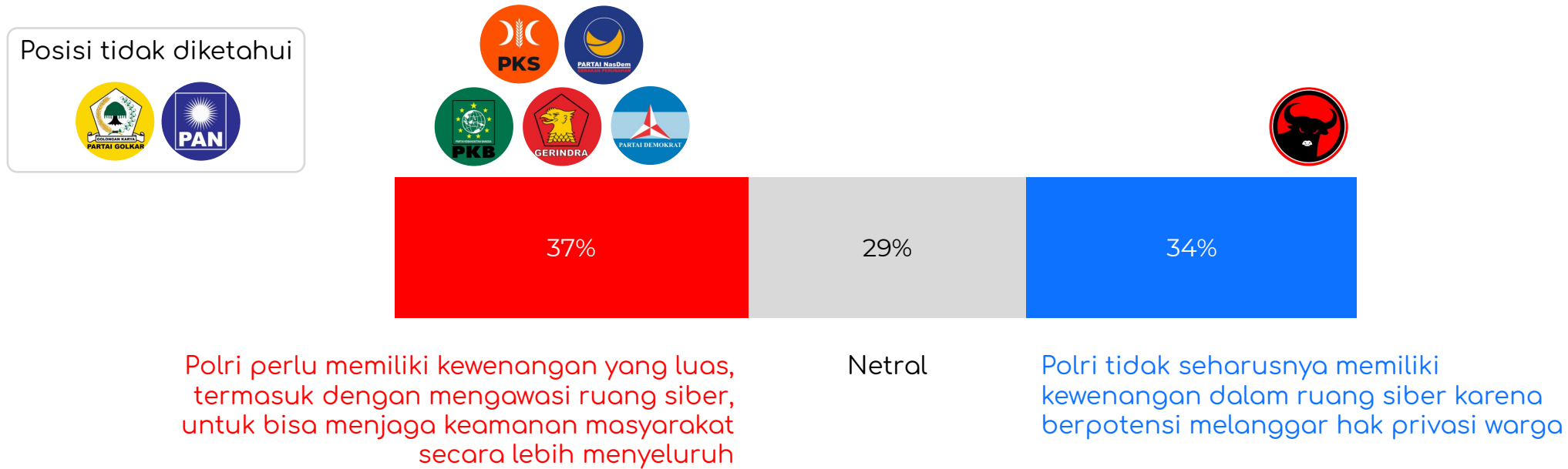
Kerugian BUMN tetap harus dianggap kerugian negara dan perlu ada pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara

RUU BUMN memiliki Fokus utama, yaitu dengan restrukturisasi kelembagaan yang signifikan dan peningkatan tata kelola negara untuk mengoptimalkan peran BUMN sebagai pihak yang melakukan pembangunan dan penciptaan nilai.

- 1. Perubahan Nomenklatur Lembaga :** RUU ini mengusulkan status Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Pengelola (BP) BUMN atau sejenisnya.
- 2. Larangan Rangkap Jabatan:** Pengaturan tegas mengenai larangan rangkap jabatan bagi Menteri, Wakil Menteri, atau pejabat pemerintah lainnya sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas BUMN, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU ini masih dalam pembahasan dan terus menjadi sorotan publik. Berbagai lapisan masyarakat mengkritisi isi RUU ini karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

Posisi masyarakat terbagi terkait kewenangan Polri atas ruang siber (internet).

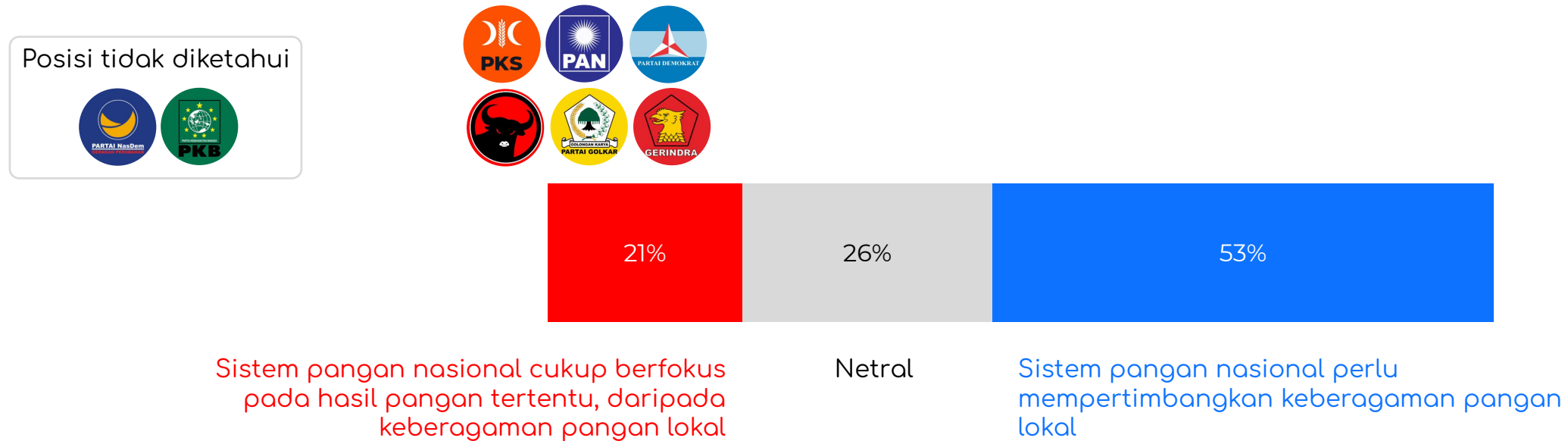


RUU Polri adalah inisiatif mendadak DPR di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, yang awalnya tidak masuk Prolegnas. Isi dari UU ini berfokus pada perluasan wewenang dan penataan ulang struktur Polri.

- Perpanjangan Usia Pensiun:** dinilai bisa mempertahankan SDM berpengalaman di posisi strategis, tetapi dikhawatirkan memperlambat regenerasi dan menambah penumpukan perwira tinggi.
- Kewenangan Penyadapan & Siber:** dianggap penting untuk menghadapi kejahatan siber dan terorisme, namun berpotensi mengancam privasi, kebebasan berekspresi, dan rawan disalahgunakan tanpa pengawasan jelas.

RUU Polri ini masih dalam pembahasan dan diharapkan segera disahkan, meski banyak pihak yang mengkritisi isi RUU tersebut.

53% masyarakat mendukung pertimbangan keberagaman pangan lokal sebagai faktor utama penentuan sistem pangan nasional.



RUU Pangan menekankan pengurangan ketergantungan impor, pengutamaan pangan lokal, serta perlindungan hak-hak produsen rakyat, sebagai koreksi terhadap UU sebelumnya yang dinilai masih berorientasi pada komoditas pasar dan mengabaikan potensi lokal serta kesejahteraan petani.

- Ketahanan Pangan Nasional:** Untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan.
- Keamanan dan Mutu Pangan:** Perlindungan konsumen dari penggunaan zat berbahaya pada produk pangan dan peningkatan standar keamanan dan mutu pangan.

Revisi ini sudah diajukan dan direncanakan sejak 2015, namun prosesnya sempat mengalami beberapa kali penundaan, sebab naskah akademik yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ada.

61% masyarakat menganggap pentingnya perampasan aset yang dilakukan sejak awal penyelidikan korupsi.



Perampasan aset penting dilakukan sejak awal untuk mencegah uang korupsi dipakai atau disembunyikan

Netral

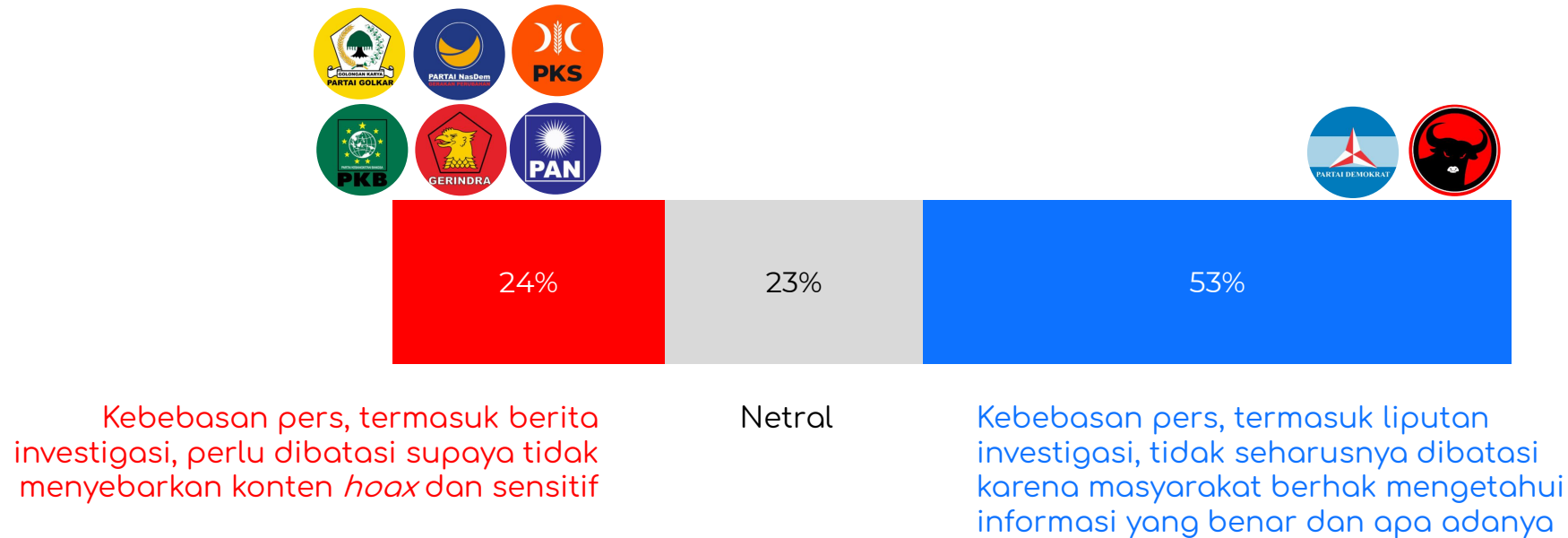
Perampasan aset berpotensi disalahgunakan karena bisa menyita aset orang yang belum terbukti bersalah

RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang akan mengatur tentang penyitaan dan pengambilalihan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, terutama korupsi, pencucian uang, narkoba, dan kejahatan berat lainnya, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terlebih dahulu kepada tersangka.. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

- 1. Pemblokiran dan penyitaan:** RUU ini mengatur kewenangan penyidik untuk dapat meminta pemblokiran dan penyitaan aset terduga pelaku.
- 2. Konsep Tanpa Asas Pengakuan:** Melalui RUU ini penyidik atau jaksa dapat langsung menelusuri dan memproses aset yang diduga berasal dari kejahatan.

RUU Perampasan Aset sudah sering disebut akan segera disahkan namun hingga saat ini masih belum disahkan. Meskipun sebenarnya, memang ada beberapa pasal yang dinilai berbahaya.

Sebagian besar masyarakat menolak adanya pembatasan kebebasan pers.



RUU Penyiaran adalah rancangan undang-undang yang akan memperkuat kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga pengawas dengan membatasi konten yang 'dianggap' berbahaya seperti mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. RUU ini juga akan melakukan pelarangan terhadap jurnalisme investigatif. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

1. **Kewenangan KPI:** RUU ini akan memperkuat kewenangan KPI dengan memperluas kewenangannya untuk mengawasi konten digital/media sosial.
2. **Pembatasan konten:** RUU ini mengatur tentang pembatasan konten yang mengatur unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, serta yang dianggap 'berbahaya'. Bentuk konten jurnalisme investigatif juga akan dilarang.

RUU Penyiaran direncanakan akan dibahas dan disahkan pada tahun ini, beberapa kali sudah masuk fokus pembahasan DPR.



6 Opini Masyarakat terhadap Aksi Demonstrasi, Peran Koalisi, dan Oposisi

Aksi Demonstrasi dan Gelombang Protes Akhir Agustus 2025

Aksi demonstrasi dan gelombang protes pada akhir Agustus lalu merupakan aksi yang terpantik sejak 25 Agustus untuk menuntut pencabutan tunjangan DPR yang tinggi di tengah kondisi ekonomi yang buruk. Aksi demonstrasi 25 Agustus ini terus berlanjut setelah melihat pernyataan dan sikap dari sejumlah anggota DPR yang tidak empatik (Kompas, 2025).

Ketika aksi pada 28 Agustus 2025 berlanjut hingga malam, aparat semakin represif untuk membubarkan massa. Puncaknya ketika anggota Polri yang mengendarai mobil lapis baja Baracuda menabrak dua orang ojek *online* (ojol). Akibatnya, satu korban mengalami luka-luka dan satu korban, Affan Kurniawan, meninggal dunia. Kejadian tersebut memicu gelombang kemarahan dari berbagai elemen masyarakat. Pada malam yang sama, Aliansi Ojol mendatangi markas Brimob di Kwitang (Tempo.co, 2025).

Pada tanggal 29 Agustus 2025, beragam elemen masyarakat seperti mahasiswa, ojol, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban serta akuntabilitas kinerja Polri karena dianggap selalu bertindak represif kepada masyarakat, terutama ketika demonstrasi. Mahasiswa menilai perbaikan menyeluruh diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kepolisian (Tempo.co, 2025).

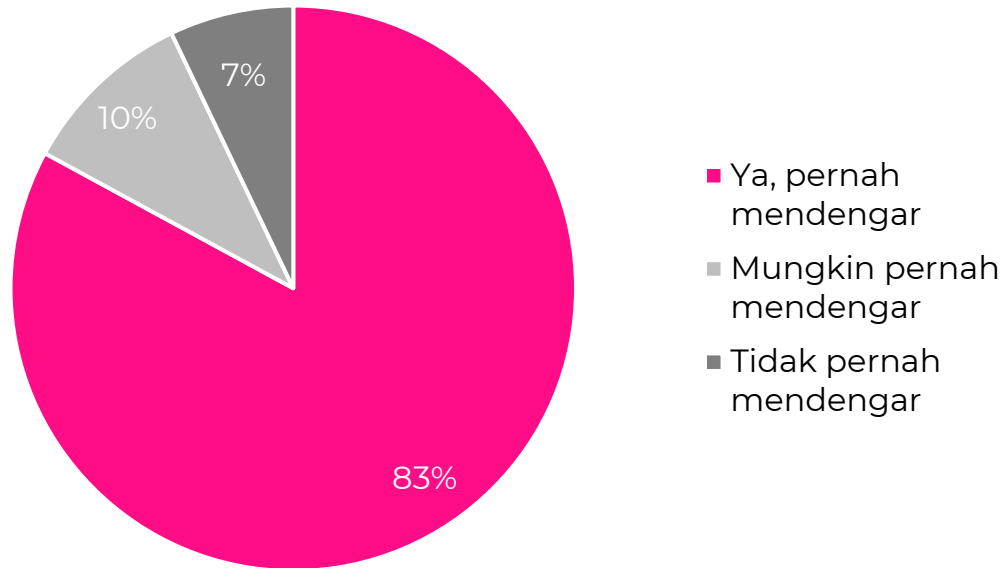
Aksi demonstrasi yang awalnya hanya terpusat di Jakarta, akhirnya meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Makassar, Surabaya dan lain sebagainya (Tempo.co, 2025). Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum, setidaknya terdapat 3.337 orang yang ditangkap sepanjang gelombang protes dan demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025 di 20 kota, seperti Jakarta, Depok, Semarang, Cengkareng, Kabupaten Bogor, Yogyakarta, Magelang, Bali, Bandung, Pontianak, Medan, Sorong, Samarinda, Jambi, Surabaya, dan Malang (Kompas, 2025).

Sejumlah media internasional menyoroti aksi demonstrasi tersebut, seperti The Strait Times (Singapura), NHK (Jepang), Press TV (Iran), hingga Anadolu Agency (Turkiye) (CNN Indonesia, 2025). Selain mendapat sorotan internasional, aksi demonstrasi akhir Agustus juga menyita perhatian berbagai pihak, salah satunya orang muda Nepal. Mereka melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintahnya disebut karena terinspirasi dari aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia (CNBC Indonesia, 2025).

Mayoritas masyarakat yang mengetahui aksi demonstrasi mendapatkan informasi dari media sosial

Mengetahui aksi demonstrasi

base: semua, n=404



Sebagian besar masyarakat mengetahui aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Mereka yang pernah mendengar aksi demonstrasi umumnya adalah mereka yang menyadari peran oposisi (93%) dan sangat menyadari peran oposisi (95%), serta mereka yang menganggap oposisi harus berperan aktif (84%) dan dominan dalam pemerintahan (89%).

Sumber informasi demonstrasi

base: mengetahui aksi, n=377

	Total
Media sosial dan komunikasi	83%
Artikel berita online	47%
Televisi	45%
Teman atau keluarga	26%
Komunitas atau organisasi	11%
Tempat kerja	10%
Koran/majalah	6%
Sekolah atau kampus	4%
Radio	4%
Lainnya	1%

Media sosial sumber informasi demonstrasi

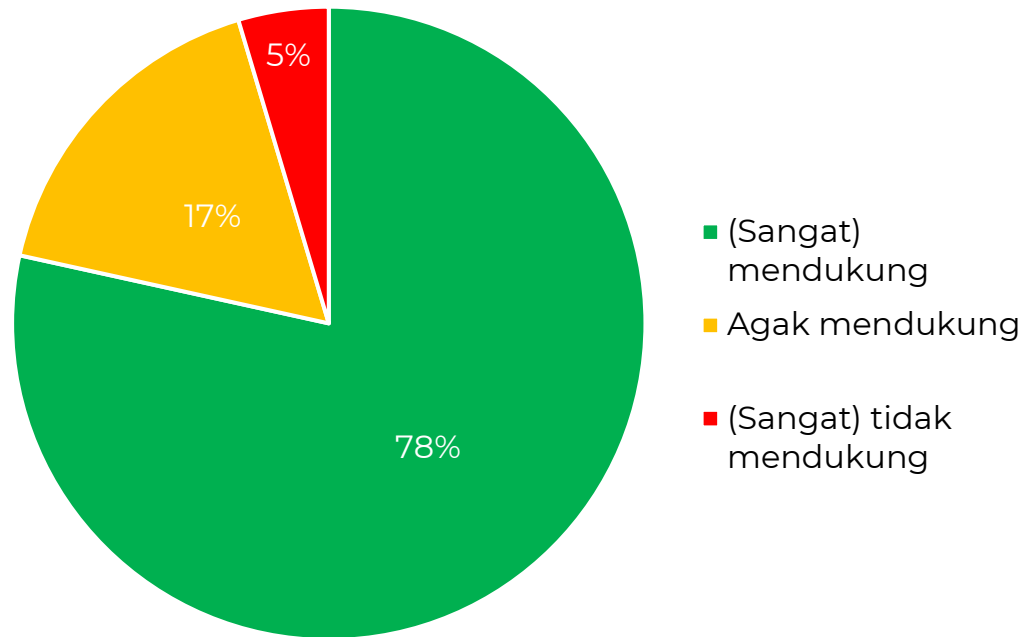
base: mengetahui lewat media sosial, n=316

	Total
Instagram	65%
TikTok	61%
Facebook	51%
YouTube	27%
WhatsApp	21%
Twitter/X	20%

4 dari 5 orang yang mengetahui demonstrasi, menyatakan (sangat) mendukung aksi demonstrasi tersebut.

Sikap terhadap aksi demonstrasi

base: mengetahui aksi, n=377

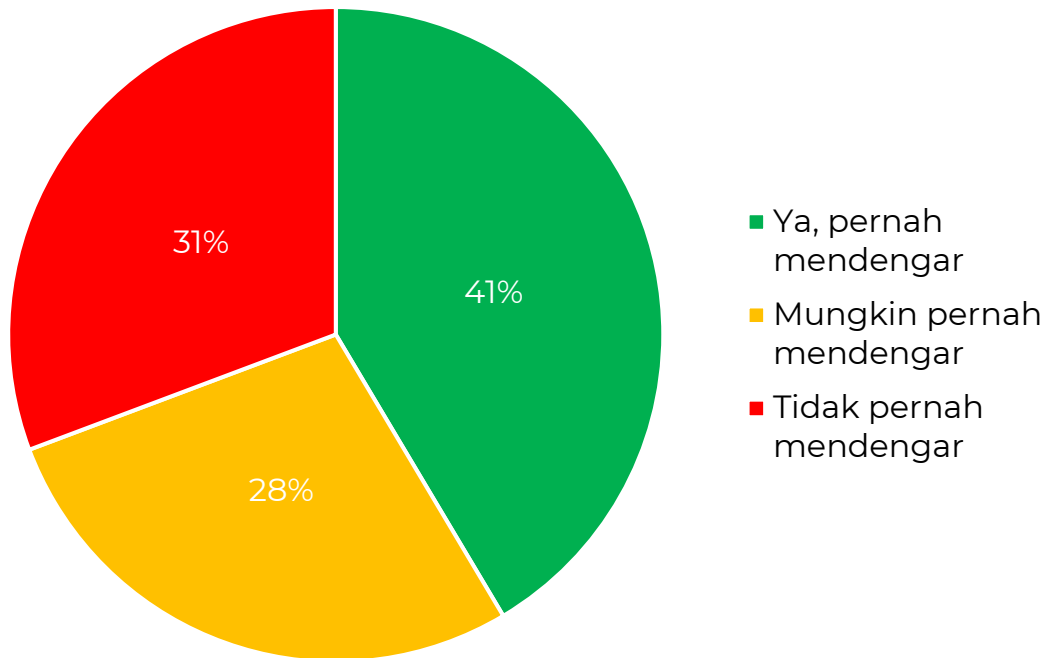


Masyarakat yang mendukung aksi demonstrasi adalah mereka yang menyadari (81%) dan sangat menyadari (87%) peran oposisi, serta menganggap bahwa oposisi harus kurang berperan (92%), juga mereka yang menganggap oposisi harus dominan dalam pemerintah (87%). Selain itu, mereka yang sangat mendukung aksi demonstrasi adalah mereka yang demokratis (89%) dan sangat demokratis (99%)

Masyarakat lebih mengenal oposisi (63%) dibandingkan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) (41%)

Mengetahui KIM Plus

base: semua, n=404



Mereka yang pernah mendengar Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) adalah mereka yang menganggap harus ada peran aktif dari oposisi (40%) dan harus sangat aktif/dominan (55%).

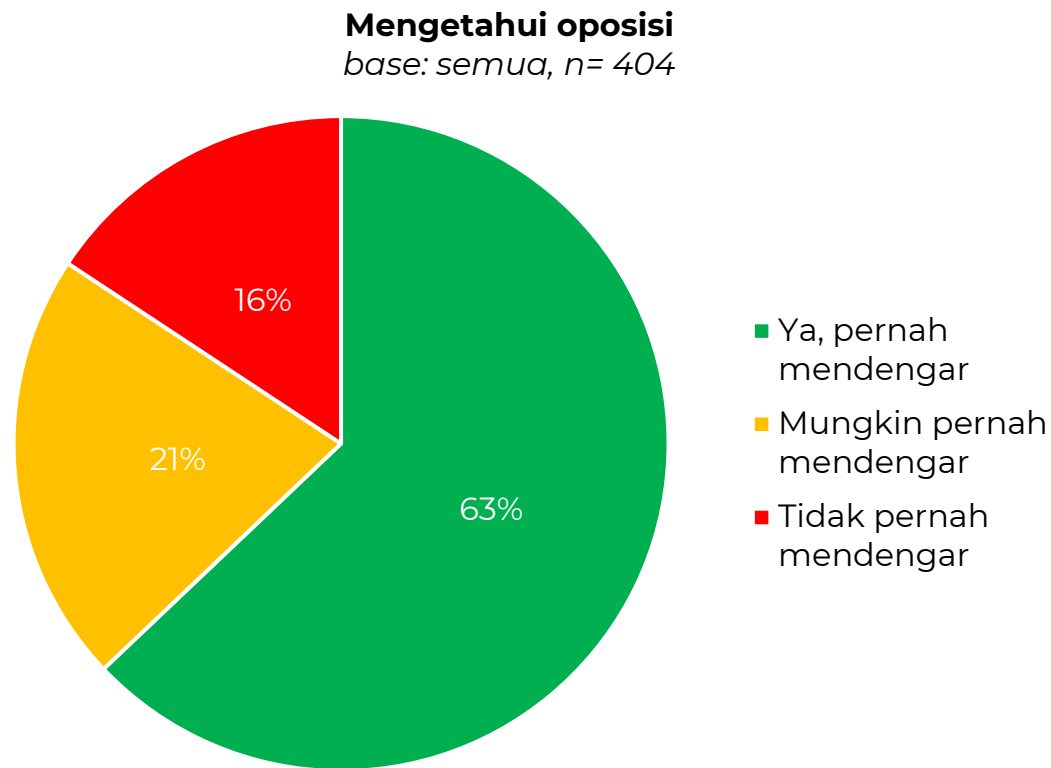
Dengan perbedaan yang tidak sangat signifikan, mereka yang tidak mengetahui KIM Plus adalah mereka yang menganggap oposisi tidak harus terlibat (46%).

Nice to know

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dibentuk atas inisiatif Prabowo Subianto untuk menyatukan partai-partai yang sebelumnya bersaing dalam Pilpres 2024. Koalisi ini beranggotakan sembilan partai utama anggota KIM, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima.

Koalisi ini kemudian diperluas dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem. Perluasan inilah yang kemudian disebut sebagai KIM Plus.

Masyarakat lebih mengenal oposisi (63%) dibandingkan Koalisi Indonesia Maju Plus (Kim Plus) (41%)



Masyarakat Indonesia yang pernah mendengar oposisi merupakan mereka yang merasa oposisi harus berperan aktif (61%) dan harus memiliki peran dominan (80%) dalam pemerintahan. Selain itu, masyarakat yang cukup demokratis (67%), demokratis (64%), dan sangat demokratis (92%) adalah mereka yang mengetahui oposisi.

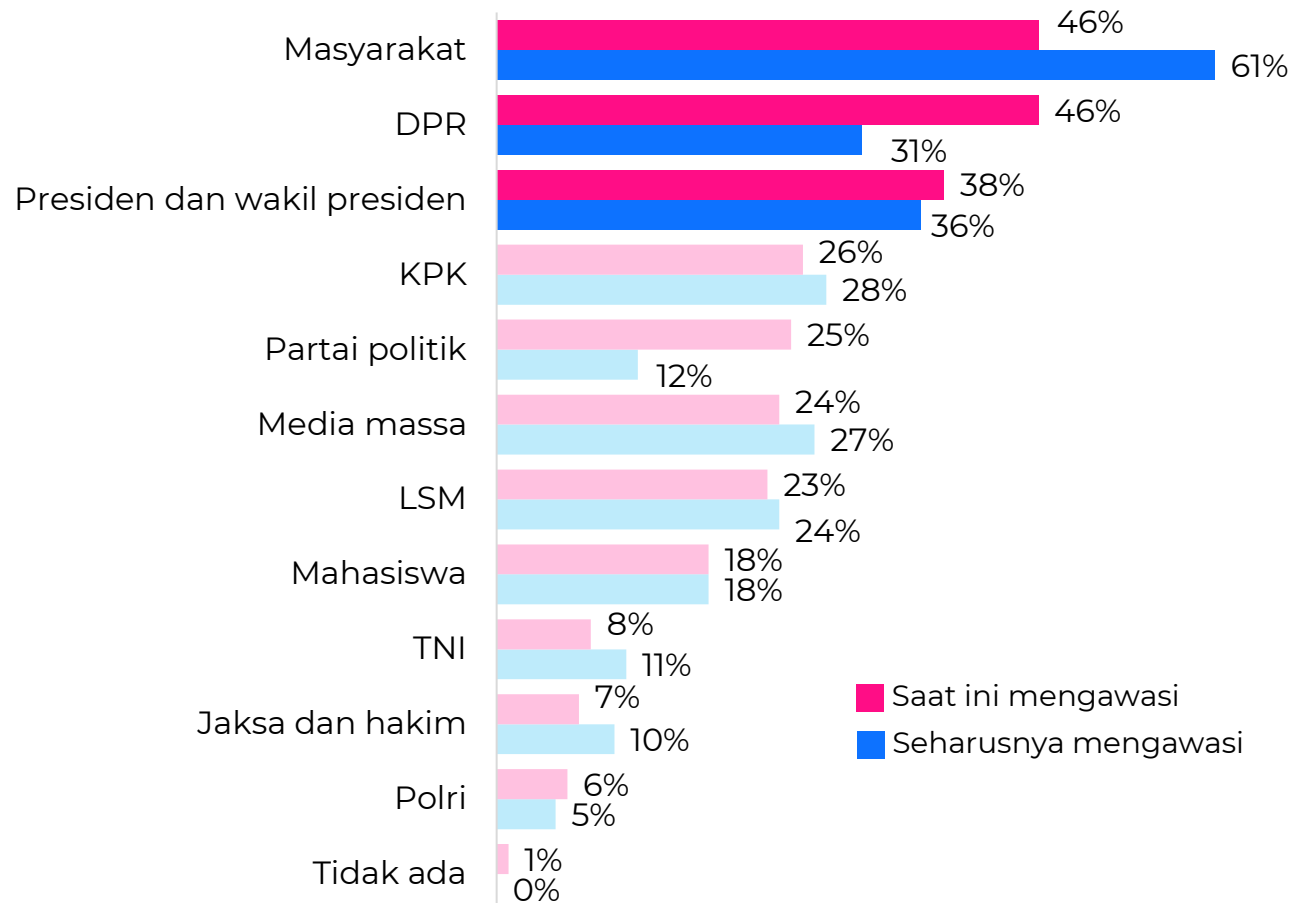
Nice to know

Oposisi berperan penting dalam **menjaga jalannya pemerintahan yang demokratis**. Mereka mengawasi tindakan pemerintah dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dengan memberikan pandangan berbeda, oposisi membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik. Selain itu, keberadaan oposisi memperkuat fondasi demokrasi dengan memastikan adanya ruang bagi perbedaan pendapat dan kontrol terhadap partai yang berkuasa.

Masyarakat menjadi pihak yang saat ini dinilai paling mengawasi kebijakan pemerintah (46%) dan tetap harus mengawal ke depannya (61%).

Saat ini mengawasi kebijakan
base: mengetahui KIM Plus, n=281
Seharusnya mengawasi kebijakan
base: mengetahui KIM Plus, n=281



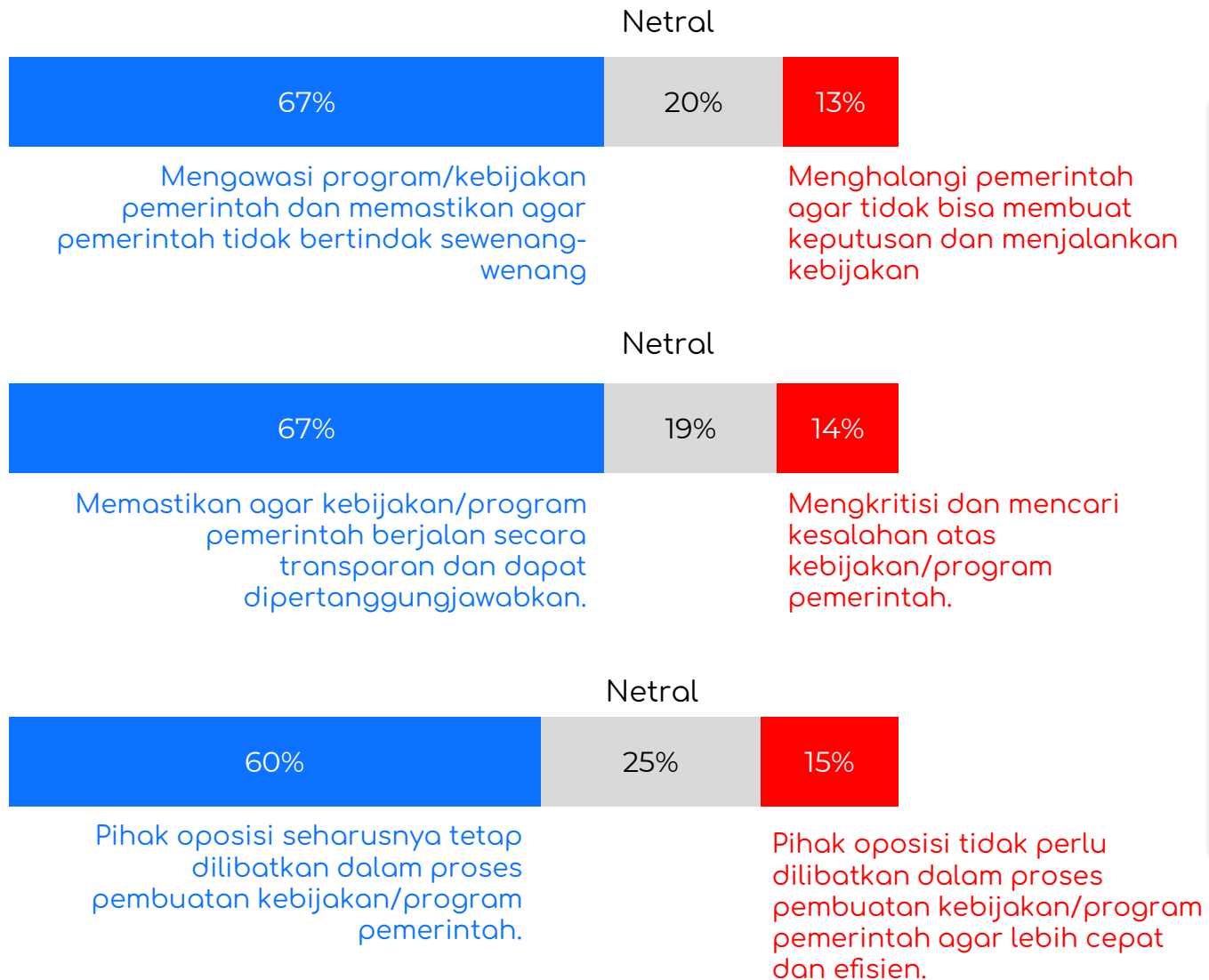
Saat ini, pihak yang dianggap berperan mengawasi kebijakan pemerintah adalah masyarakat dan DPR (keduanya 46%). Sementara itu, pihak yang dianggap seharusnya mengawasi kebijakan pemerintah adalah masyarakat (61%), disusul dengan presiden dan wakil presiden (36%), dan DPR (31%).

Nice to know

Berdasarkan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Miriam Budiardjo, **Badan Legislatif (DPR) berkewajiban untuk mengawasi aktivitas Badan Eksekutif (Pemerintah/Presiden)**, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 227 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebut **anggota DPR berhak mengawasi pelaksanaan APBN** dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Setidaknya 3 dari 5 orang sudah mengetahui peran oposisi dalam pemerintahan.

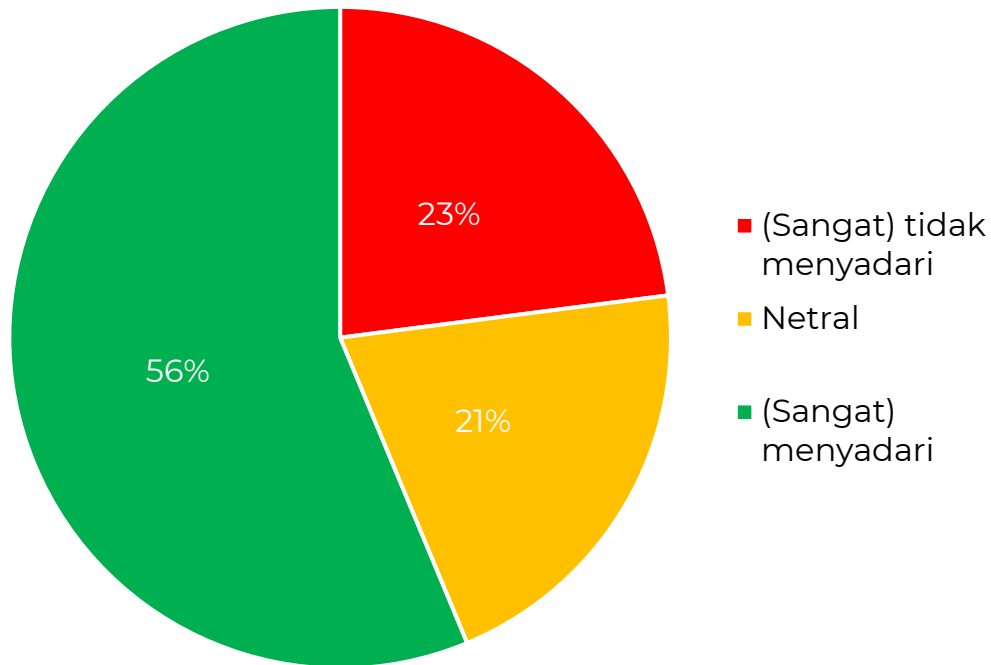


Dalam memahami peran oposisi dalam pengawasan kekuasaan, kebijakan, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap fungsi oposisi cenderung lebih memahami pentingnya keberadaan oposisi di pemerintahan. Semakin demokratis masyarakat, semakin besar pula pemahaman mereka bahwa oposisi perlu berperan aktif sebagai pengawas dan penyeimbang dalam sistem pemerintahan.

Masyarakat Indonesia sudah menyadari peran oposisi dalam pemerintahan.

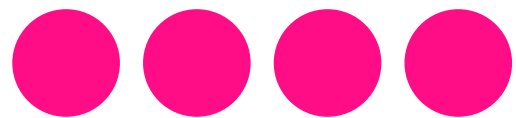
Kesadaran masyarakat terhadap peran oposisi

base: semua, n=404



Mereka yang sangat menyadari peran oposisi adalah laki-laki (45%) dan mereka yang menganggap peran oposisi harus sangat aktif/dominan dalam pemerintahan (54%). 38% masyarakat yang sangat menyadari peran oposisi.

Sementara itu, mereka yang (sangat) tidak menyadari peran oposisi secara signifikan merupakan masyarakat dengan pendidikan SMP/SMA sederajat (14%), menilai kinerja pemerintah pusat (sangat) buruk (18%), dan menganggap peran oposisi dalam pemerintahan harus sangat pasif (35%).



Lampiran



Cara membaca *NET Score*

NET Score

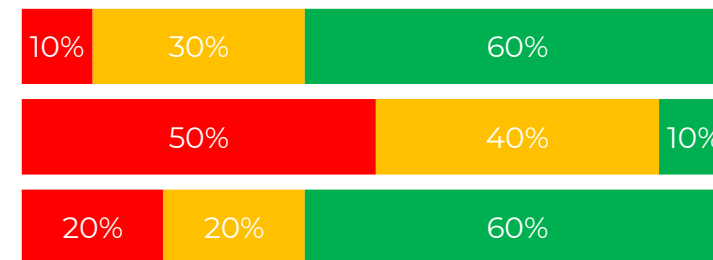
NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).**



Sumber: Storyset

Contoh:



■ (Sangat) tidak puas ■ (Agak) puas ■ (Sangat) puas

NET Score

50%

-40%

40%